

**EKOFEMINISME DAN PEMBANGUNAN  
BERKELANJUTAN DI PROVINSI BANTEN  
(STUDI KASUS PERAN DAN AKTIVITAS NGO LAZ HARFA)**



Oleh:

Azizah Alawiyah, B.Ed., M.A.

Gian Nova Sudrajat Nur, M.Hum.

Fuad Zainuddin, M.E.

Penelitian Kajian Strategis Nasional  
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)  
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten  
2022

### **Hak cipta Dilindungi oleh Undang-Undang**

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit. Isi diluar tanggung jawab percetakan

### **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.**

#### **Fungsi dan Sifat Hak Cipta**

##### **Pasal 2**

1. Hak Cipta merupakan hak eksekutif bagi pencipta dan pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### **Hak Terkait Pasal 49:**

1. Pelaku memiliki hak eksekutif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.

##### **Sanksi Pelanggaran Pasal 72**

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00,- (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00,- (lima milyar rupiah)
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama lima (5) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah)

**EKOFEMINISME DAN PEMBANGUNAN  
BERKELANJUTAN DI PROVINSI BANTEN  
(STUDI KASUS PERAN DAN AKTIVITAS NGO LAZ HARFA)**

Azizah Alawiyah, B.Ed., M.A.  
Gian Nova Sudrajat Nur, M.Hum.  
Fuad Zainuddin, M.E.

**MEDIA MADANI**

**EKOFEMINISME DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN  
DI PROVINSI BANTEN  
(STUDI KASUS PERAN DAN AKTIVITAS NGO LAZ HARFA)**

**Penulis:**

Azizah Alawiyyah, B.Ed., M.A.  
Gian Nova Sudrajat Nur, M.Hum.  
Fuad Zainuddin, M.E.

**Lay Out & Design Sampul**

Media Madani  
Cetakan 1 Januari 2023  
Hak Cipta 2023, Pada Penulis

---

Isi diluar tanggung jawab percetakan

---

Copyright@ 2023 by Media Madani Publisher

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, mengutip, menggandakan, atau  
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari  
Penerbit

**Penerbit & Percetakan**

**Media Madani**

Jl. Syekh Nawawi KP3B Palima Curug Serang-Banten email:  
[media.madani@yahoo.com](mailto:media.madani@yahoo.com) & [media.madani2@gmail.com](mailto:media.madani2@gmail.com)  
Telp. (0254) 7932066; Hp (087771333388)

---

**Katalog Dalam Terbitan (KDT)**

Azizah Alawiyyah, B.Ed., M.A., dkk.

Ekofeminisme dan Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi  
Banten (Studi Kasus Peran dan Aktivitas Ngo Laz Harfa)

/ Oleh: Azizah Alawiyyah, B.Ed., M.A., dkk.

Cet.1 Serang: Media Madani, Januari 2023. xiv+ 110 hlm

ISBN. 978-623-430-055-0

1. Ekofeminisme dan Pembangunan

1. Iudul

## LEMBAR IDENTITAS

Judul Penelitian : Ekofeminisme dan Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Banten (Studi Kasus Peran dan Aktivitas NGO LAZ Harfa)

Kategori : Penelitian Kelompok

Bidang Ilmu : Pendidikan Bahasa Arab

Nama Peneliti : Azizah Alawiyah, B.Ed., M.A.

Posisi dalam Penelitian : Ketua

NIP : 19771215 201101 2 004

Jabatan : Lektor

Waktu Penelitian : Juni - Oktober 2022

Biaya : Rp. 60.000.000,-

Serang, Oktober 2022  
Peneliti

Azizah Alawiyah, B.Ed., M.A.  
NIP. 19771215 201101 2 004

Ketua LP2M  
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Dr. Hunainah, M.M  
NIP. 19670414 199303 2 003



## ABSTRAK

Fokus penelitian ini mengenai *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau yang dikenal juga dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Provinsi Banten dengan melihat peran pemerintah daerah, *Non Government Organization* (NGO) LAZ-Harfa, dan partisipasi aktif perempuan dalam pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam melalui analisis narasi otobiografis perempuan dari NGO LAZ Harfa dan penerima manfaat programnya. Dengan menggunakan teori ekofeminisme, pemberdayaan masyarakat, dan konsep pembangunan berkelanjutan ditunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan sangat perlu melibatkan partisipasi aktif dari perempuan. Melalui metode kualitatif dengan pendekatan etnometodologi dan otobiografi, diperlihatkan bahwa program SDGs yang dilakukan oleh pemerintah cenderung *top down*, dan belum banyak mengintegrasikan antar tujuan. Selain itu, ditunjukkan bahwa peran dan aktivitas LAZ Harfa dapat dikategorikan sebagai gerakan ekofeminisme. Hal itu dilihat melalui programnya yang menampilkan pelibatan aktif perempuan dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam. Selain itu, melalui pelibatan aktif perempuan, ketercapaian tujuan pembangunan berkelanjutan tidak bersifat parsial, saja, melainkan berdampak pada tercapainya tujuan yang lain. Ditunjukkan juga bahwa pengetahuan dan pengalaman perempuan lokal diasumsikan sebagai sumber daya yang penting dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** ekofeminisme, feminisme, lingkungan, SDGs, NGO



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT Tuhan semesta alam. Atas kuasanya sehingga penelitian tentang Ekofeminisme dan Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Banten (Studi Kasus Peran dan Aktivitas NGO LAZ Harfa) dapat diselesaikan.

Shalawat beriring salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, yang semoga kita mampu meneladaninya.

Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang banyak membantu sehingga penelitian ini dapat selesai dengan baik, terutama kepada:

1. Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd.;
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Dr. Hunainah, M.M.;
3. Kepala Pusat Penelitian UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Ade Jaya Suryani, M.A., PhD., beserta para staf;
4. Dekan Fakultas Dakwah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Dr. H. Endad Musaddad, M.A.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten;

6. Direktur Utama Lembaga Amil Zakat Harapan Dhuafa, Indah Prihanande, S.E.;
7. Direktur Program dan Kemitraan Lembaga Amil Zakat Harapan Dhuafa, Mamak Jamaksari, S.Sos., M.Kes;
8. Beserta seluruh jajaran pegawai Lembaga Amil Zakat Harapan Dhuafa.

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun yang mana akan menjadi masukan bagi peneliti agar dapat menjadi jauh lebih baik lagi dalam penelitian selanjutnya. Peneliti juga berharap penelitian ini dapat dimanfaatkan seluas mungkin bagi berbagai lembaga, baik institusi pemerintah, CSR perusahaan swasta, dan juga lembaga sosial lainnya. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi naskah akademik yang dapat memberikan kontribusi terhadap kebijakan-kebijakan dalam pensuksesan *Sustainable Development Goals*/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Serang, Oktober 2022

Peneliti

## DAFTAR ISI

LEMBAR IDENTITAS.....	v
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR TABEL .....	xiv

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

2.1 Penelitian Terdahulu .....	9
2.2 Budaya, Feminisme, dan Ekologi.....	13
2.3 Pemberdayaan dan Pembangunan Berkelanjutan .....	23

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

3.1 Objek Penelitian .....	27
3.2 Metode Penelitian.....	28

## **BAB IV PEMBAHASAN**

4.1	Provinsi Banten dan Sustainable Development Goals (SDGs).....	36
4.2	LAZ Harfa, Pemberdayaan Perempuan dan Lingkungan.....	41
4.2.1	Lembaga Amil Zakat Harapan Dhuafa.....	41
4.2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Lingkungan.....	51
4.3	Banten : Perempuan dan Lingkungan .....	80
4.3.1	Banten dan Perempuan .....	80
4.3.2	Perempuan dan Lingkungan.....	83
4.4	Peluang dan Tantangan .....	96
4.4.1	Tantangan.....	96
4.4.2	Peluang.....	97

## **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

5.1	Simpulan .....	101
5.2	Saran.....	103

DAFTAR PUSTAKA.....	105
---------------------	-----

LAMPIRAN

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Capaian IDG Provinsi Banten .....	39
Gambar 4.2 Struktur Organisasi LAZ Harfa .....	50
Gambar 4.3 Kelompok Keuangan Mikro.....	54
Gambar 4.4 Arisan Jamban .....	57
Gambar 4.5 Sarana Air Bersih .....	59
Gambar 4.6 Promosi Kesehatan .....	63
Gambar 4.7 Pemanfaatan Lahan Pekarangan .....	65
Gambar 4.8 Pemberdayaan Difabel .....	68
Gambar 4.9a Pelatihan Pengelolaan Sampah .....	72
Gambar 4.9b Pelatihan Pengelolaan Sampah .....	73
Gambar 4.10a Pelatihan Pengelolaan Bahan Makanan .....	74
Gambar 4.10b Pelatihan Pengelolaan Bahan Makanan .....	75
Gambar 4.11a Pelatihan Pengelolaan dan Inovasi Produk Lokal.....	77
Gambar 4.11b Pelatihan Pengelolaan dan Inovasi Produk Lokal.....	78
4.12 Penghijauan Lahan Pekarangan dan Lahan Kosong .....	79

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Amil LAZ Harfa .....	47
-------------------------------------	----

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dengan tetap fokus terhadap keberlangsungan bumi. Alisjahbana (2018: 176) dalam bukunya “Menyongsong SDGs Kesiapan Daerah-daerah di Indonesia” mengemukakan bahwa di Provinsi Banten berdasarkan data tahun 2012 hingga proyeksi pada tahun 2030 cenderung terjadi peningkatan pencapaian yang cukup baik dengan nilai skor C, dengan angka skor di atas rata-rata nasional. Proyeksi peningkatan tersebut terlihat pada isu kesetaraan gender dan air bersih dan sanitasi. Selain itu, dalam rilis Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak (2020), Indeks Pembangunan Gender (IDG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IPG), Provinsi Banten termasuk ke dalam daerah yang memiliki skor tinggi dari dua aspek tersebut. Dengan perkataan lain, terjadi tren peningkatan dalam aspek kesetaraan gender hingga tahun 2020. Akan tetapi hal tersebut bertemu sisi paradoksnya ketika bermunculan berbagai lembaga filantropi/*Non Government Organization* (NGO). Kemunculan berbagai lembaga itu

dapat dikatakan sebagai bentuk kekurangpuasan masyarakat atas peran dan kebijakan pemerintah, sehingga mereka turut menambal agenda-agenda pemerintah yang belum terwujudkan melalui lembaga tersebut, salah satunya isu perempuan dan lingkungan.

Isu perempuan berkaitan erat dengan isu lingkungan. Mies dan Shiva (yang dikutip oleh Priyatna 2017) mengemukakan bahwa keterhubungan feminisme dan lingkungan ini tidak terlepas dari adanya kesamaan situasi dan posisi perempuan dan alam yang selalu ditindas oleh kekuatan patriarkal. Sebagaimana feminisme, keberadaan lingkungan tidak jarang dianggap sebagai 'yang lian' sama seperti perempuan. Selain itu, perempuan dan lingkungan seringkali dikaitkan satu sama lainnya. Dalam mitos Dewi Sri pada masyarakat Sunda contohnya, ia direpresentasikan sebagai perempuan yang dalam hal ini merupakan asal usul padi (Azhima & Muhtadin, 2020). Melalui hal tersebut dapat dilihat bahwa analogi padi bercerita tentang peran perempuan sebagai kaum yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia lainnya, sebagaimana kehadiran alam itu sendiri. Selain itu tanah air sendiri seringkali disimbolkan sebagai sosok perempuan, atau yang sering didengar dengan sebutan Ibu Pertiwi.



Keterkaitan alam dan perempuan menurut pertama kali diajukan oleh Francoise D'aubone pada tahun 1974 melalui esainya "*Le Feminisme ou la mort* – Feminisme atau kematian sebagai terminologi ekofeminisme (Priyatna, dkk., 2017). Warren (1997) mencoba mengelompokkan paham-paham dalam etika lingkungan, salah satunya mengkategorikan ekofeminisme termasuk ke dalam paradigma ekologi yang radikal. Sebagai paradigma ekologi yang radikal, ekofeminisme meleburkan batas-batas antara manusia dengan alam, atau dengan kata lain tidak ada hirarki. Bagi Arrivia (2002) ekofeminisme sendiri melihat bagaimana posisi perempuan sama halnya dengan alam, dianggap sebagai 'yang liyan'. Artinya, posisi alam sendiri dianggap sebagai objek yang bisa dieksploitasi secara bebas oleh manusia. Terdapat hirarki yang berupa dominasi manusia terhadap hewan, tanah, air, hutan, dan lain sebagainya, sebagaimana dominasi laki-laki terhadap perempuan, ataupun kepada kulit-kulit yang berwarna. Oleh karena itu, ekofeminisme menjadi sebuah perjuangan dalam membela hak-hak yang dimiliki oleh alam itu sendiri. Bukan hanya melihat keterkaitan perempuan dengan alam melalui perjuangan yang dilakukannya, lebih jauh lagi ekofeminisme menjadi gerakan yang mencoba melawan – *ism of domination*.

Di Provinsi Banten, terdapat berbagai macam NGO yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan dengan cakupan yang bermacam-macam, baik itu berskala internasional, nasional, maupun lokal. Adapun yang menjadi sorotan utama adalah Lembaga Amil Zakat Harapan Dhuafa (LAZ-Harfa). Program-program dalam lembaga ini terlihat lebih menitikberatkan kepada paradigma pembangunan ‘*people centered development*’ atau pembangunan yang berpusat kepada manusia, yang dalam hal ini masyarakat lokal. Nur (2021: 27) mengemukakan bahwa paradigma ini berpandangan bahwa masyarakat bukan hanya sebagai objek dari pembangunan, melainkan subjek dari pembangunan itu sendiri. Dengan perkataan lain, mereka memiliki kuasa untuk melakukan pengelolaan sumber daya yang ada di lingkungan tempat tinggalnya.

Metode yang digunakan dalam program pemberdayaan LAZ Harfa yaitu melalui metode ABCD (*Asset Based Community Development*)<sup>1</sup>, yang mana pengembangan/pemberdayaan masyarakat yang didasarkan kepada sumber daya daerah tersebut. Dalam pelaksanaan program pemberdayaan, LAZ Harfa banyak berperan sebagai fasilitator dan dilakukan

---

<sup>1</sup> Laman resmi LAZ Harfa, [www.lazharfa.org](http://www.lazharfa.org) . Diakses pada 5 Oktober 2021 pukul 18:05 WIB.

dalam kurun waktu yang cukup panjang, dengan minimal selama 3 bulan.<sup>2</sup> Lamanya kegiatan pemberdayaan tersebut dikarenakan proses yang dilakukan bertujuan agar masyarakat menjadi mandiri secara utuh melalui perubahan pola pikir dan cara pandang masyarakat dalam menghadapi masalah di kehidupannya juga cara menyelesaikan masalah tersebut secara berkelanjutan. Selain itu, pemberdayaan yang dilakukan banyak melibatkan perempuan, baik itu dalam keberlangsungan lingkungan alam maupun pemberdayaan ekonomi.

Sekait dengan itu, studi terhadap LAZ Harfa dalam program-program yang dilakukan selama awal berdiri hingga kini juga proyeksi di masa depan menjadi hal yang menarik untuk diangkat. Kehadirannya sendiri tidak hanya sebagai lembaga yang menyalurkan zakat infak dan shadaqah yang diberikan kepada lembaga. Lebih dari itu, proses pemberdayaan yang dilakukan bertujuan untuk merubah pola pikir masyarakat sehingga terjadi peningkatan kualitas hidup. Baik dari segi kualitas diri sebagai manusia, peningkatan secara ekonomi dan keberlangsungan alam di lingkungan tempat tinggal mereka, yang dalam prosesnya banyak

---

<sup>2</sup> Wawancara awal dengan Direktur Program Pemberdayaan, Mamak Jamaksari pada 6 Oktober Pukul 13:00 WIB.

melibatkan perempuan sebagai subjek dari pembangunan di daerah tersebut.

### **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana ketercapaian SDGs di Provinsi Banten dalam pembangunan perempuan dan pelestarian lingkungan yang memihak kepada perempuan?
2. Bagaimana dampak kehadiran LAZ Harfa dalam pembangunan perempuan dan pelestarian lingkungan yang melibatkan perempuan di Provinsi Banten dan kaitannya dengan ekofeminisme?
3. Bagaimana peluang dan tantangan SDGs jika mengintegrasikan antar tujuan khususnya melalui program pemberdayaan dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Mengkaji ketercapaian SDGs di Provinsi Banten dalam pembangunan perempuan dan pelestarian lingkungan yang memihak kepada perempuan.
2. Mengkaji dampak kehadiran LAZ Harfa dalam pembangunan perempuan dan pelestarian

lingkungan yang melibatkan perempuan di Provinsi Banten dan kaitannya dengan ekofeminisme.

3. Mengkaji peluang dan tantangan SDGs jika mengintegrasikan antar tujuan khususnya melalui program pemberdayaan dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengelolaan sumberdaya alam.

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian, pengetahuan dan pengalaman perempuan merupakan aset berharga yang dapat menjadi referensi agar dapat mengintegrasikan tujuan-tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau yang dikenal juga dengan pembangunan berkelanjutan. Dengan perkataan lain, melalui pengetahuan dan pengalamannya, perempuan memegang peranan penting dalam suksesnya SDGs, karena melalui pemberdayaan perempuan dapat membuka jalan bagi tujuan-tujuan SDGs lainnya. Oleh karena itu, harapannya hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan terhadap Rencana Aksi Daerah (RAD) di Provinsi Banten untuk mensukseskan SDGs melalui kegiatan pemberdayaan yang berpusat kepada manusia yang bersifat *bottom up* (berdasarkan hasil musyawarah dari masyarakat, khususnya pelibatan aktif perempuan).



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini, akan dikemukakan teori-teori yang digunakan untuk dijadikan pondasi dalam penelitian ini. Teori-teori tersebut dibagi ke dalam dua bagian, pertama mengenai budaya, ekologi manusia, dan ekofeminisme. Pada bagian ini, akan dibahas mengenai pentingnya peran perempuan dalam pengelolaan sumberdaya alam sebagai subjek dari pembangunan itu sendiri. Pentingnya keterlibatan perempuan untuk memiliki kuasa atas lahan bukan hanya sebagai pengolah lahan melainkan sebagai penentu kebijakan dalam pengelolaan lahan. Selain itu, dalam bagian ini dikemukakan bahwa keterlibatan perempuan dalam pengelolaan lahan tersebut ternyata memiliki dampak berkelanjutan. Kedua mengenai pembangunan berkelanjutan, bagian ini akan menjelaskan bagaimana proses pemberdayaan melalui cara dan bentuk programnya dapat menyukseskan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

#### **2.1. Penelitian Terdahulu**

Kajian mengenai ekofeminisme juga pembangunan berkelanjutan jarang sekali ditemui, adapun beberapa penelitian mengkaji peran perempuan dan

keterlibatannya dengan alam. Beberapa penelitian yang mengangkat peran perempuan dan keterlibatannya dengan alam di antaranya dilakukan oleh beberapa peneliti sebagai berikut,

Artikel Jurnal yang ditulis oleh Aquarini Priyatna, Mega Subekti dan Indiryani Rachman (2017) dengan judul *Ekofeminisme dan Gerakan Perempuan di Bandung*. Di artikel jurnal tersebut dikemukakan mengenai peran perempuan di Kota Bandung yang merupakan Ibu Rumah Tangga tetapi menjadi aktivis dalam komunitas yang fokus terhadap kelestarian lingkungan. Priyatna (2017: 439) mengemukakan bahwa kegiatan yang dilakukan tiga perempuan aktivis tersebut merupakan gerakan ekofeminisme. Hal tersebut dikarenakan bukan hanya posisi dan status mereka sebagai ibu rumah tangga, lebih dari itu kegiatan yang dilakukan tersebut memberikan dampak pada kelestarian lingkungan.

Beberapa artikel jurnal yang mengkaji gerakan ekofeminisme di Indonesia maupun dunia, di antaranya Astuti (2012) dengan judul artikel jurnal "*Ekofeminisme dan Peran Perempuan dalam Lingkungan*". Artikel jurnal lainnya ditulis oleh Risal Maulana dan Nana Supriatna (2017) dengan judul "*Ekofeminisme: Perempuan, Alam, Perlawanan atas Kuasa Patriarki dan Pembangunan Dunia (Wangari Maathai dan Green Belt Movement 1990-2004)*". Selanjutnya artikel jurnal yang



berjudul “*Pengaruh Pemikiran Ekofeminisme Dewi Candraningrum terhadap Gerakan Akar Rumput Masyarakat Kendeng*”. Tulisan tersebut mengemukakan tentang pengaruh pemikiran ekofeminisme Dewi Candraningrum terhadap gerakan perlawanan masyarakat Kendeng atas pembangunan pabrik semen di sana (Luh, dkk., 2019).

Selain itu, ada beberapa penelitian mengkaji ekofeminisme di dalam karya sastra, di antaranya artikel jurnal milik Fatimah, dkk (2017), Solichin (2018), dan juga Nuraeni (2019). Ketiga penelitian tersebut mengemukakan tentang peran dan gerakan perempuan di dalam novel yang memperjuangkan kelestarian alam di tempat tinggal mereka.

Mengenai peran lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau yang sering didengar juga dengan *Non Government Organization* dan keterkaitannya dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, belum banyak penelitian terhadapnya. Terdapat satu penelitian yaitu yang dilakukan oleh Nanang Indra Kurniawan (2012) dengan judul “*Wacana Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan dalam Lembaga Swadaya Masyarakat di Indonesia*”. Dalam tulisannya Kurniawan (2012: 14) menegaskan ulang bahwa sudah tidak relevan lagi jika mendikotomikan masalah lingkungan itu sendiri. Selain itu Brockington dan Igoe mengemukakan bahwa

masalah dan solusi lingkungan dan pembangunan tidak terletak pada persoalan alam atau manusia, atau juga menyoal krisis ekologis ataupun keadilan. Akan tetapi lebih penting lagi untuk memperdebatkan secara luas aspek relasi di antara keduanya (2012: 14).

Penelitian-penelitian tersebut akan sangat membantu dalam penelitian mengenai Ekofeminisme dan Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Banten: Studi Kasus Peran dan Aktivitas NGO LAZ Harfa. Berangkat dari penelitian-penelitian tersebut, dapat ditegaskan bahwa penelitian yang diangkat ini belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Meskipun dapat dikatakan bahwa beberapa penelitian mengenai ekofeminisme dan atau peran NGO dalam pambangunan berkelanjutan, tetapi penelitian yang mengangkat gerakan ekofeminisme yang dilakukan oleh NGO melalui aktivitas program pemberdayaannya dapat dikatakan belum ada. Sebagaimana hal tersebut, penelitian ini akan didasarkan pada konsep-konsep keilmuan kajian budaya dan kesejahteraan sosial. Selain itu, penelitian ini akan mengkomparasikan peran pemerintah dan NGO sejak digaungkannya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sampai kondisi terkini dan proyeksi di masa mendatang.

## 2.2. Budaya, Feminisme, dan Ekologi

Bagian ini merupakan landasan konseptual dan teori yang berisikan tentang konsep-konsep yang dijadikan acuan dalam penelitian. Perihal tersebut dimaksudkan untuk mempertegas, membatasi ruang lingkup dalam penelitian, juga berperan sebagai acuan teoritis yang membantu dan berperan sebagai pisau bedah dalam penelitian ini. Adapun penelitian ini didasarkan pada keilmuan kajian budaya dan kesejahteraan sosial, meskipun ada juga mengambil dari beberapa bidang keilmuan lain sebagai pendukung.

Perspektif kajian budaya mengantarkan pada penggalian yang cukup dalam dan membedah gejala-gejala budaya komunitas secara kritis, yang dalam penelitian ini melalui ekofeminisme. Sedangkan ilmu kesejahteraan sosial digunakan untuk melihat keterhubungan kebijakan dan peran pemerintah dengan lembaga nonpemerintah yang dibangun oleh swadaya masyarakat. Selain itu, ia akan meninjau proses-proses pemberdayaan yang digunakan institusi pemerintah dan lembaga non pemerintah kepada masyarakat berdasarkan keilmuan kesejahteraan sosial.

Barker (2016) mengutip pendapat Bennet mengenai elemen-elemen dari definisi mengenai kajian budaya. Menurut Bennet yang dikutip oleh Barker (yang dikutip oleh Barker, 2016: 7-8), kajian budaya

adalah bidang interdisipliner yang secara selektif mengambil dari berbagai perspektif dari disiplin lain untuk meneliti hubungan-hubungan antara kebudayaan dan politik; kajian budaya tertarik pada segala macam praktik, lembaga dan sistem klasifikasi yang memungkinkan ditanamkannya nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kompetensi-kompetensi, rutinitas hidup, dan bentuk-bentuk perilaku khas yang menjadi kebiasaan pada suatu populasi; kajian budaya mengeksplorasi berbagai macam bentuk kekuasaan, termasuk gender, ras, kelas, kolonialisme, dan lain lain; kajian budaya bermaksud mempelajari bagaimana bentuk-bentuk kekuasaan ini saling berhubungan, serta mengembangkan cara-cara untuk memahami budaya dan kekuasaan yang bisa digunakan oleh mereka yang menjadi agen dalam upaya melakukan perubahan; wilayah institusional utama kajian budaya adalah lembaga pendidikan tinggi, dan dalam hal ini kajian budaya punya kesamaan dengan bidang-bidang disiplin akademik lain. Meski demikian, kajian budaya berusaha menjalin koneksi-koneksi di luar wilayah akademik dengan gerakan-gerakan sosial politik, para pekerja di lembaga-lembaga kebudayaan, serta manajemen kebudayaan.

Berangkat dari pendapat Bennet dalam Barker (dalam barker, 2016) kajian budaya merupakan bidang keilmuan yang interdisipliner, dengan perkataan lain

dapat menggunakan beberapa perspektif keilmuan yang lain, selama memiliki keterkaitan dengan apa yang dikaji. Oleh karena itu, kajian budaya merupakan bidang keilmuan yang luas cakupannya, dan juga merupakan keilmuan yang cocok untuk mengkaji gejala-gejala budaya. Kajian budaya dapat melakukan koneksi dengan bidang keilmuan lainnya, sehingga kajian yang berkaitan dengan gejala budaya akan menciptakan kajian yang lebih baik. Sekait dengan itu, ekofeminisme dapat menjadi salah satu bagian dalam kajian yang dilakukan oleh disiplin kajian budaya.

Istilah ekofeminisme berasal dari dua term, yaitu ekologi dan feminisme. Ekologi sendiri merupakan bidang ilmu yang mengkaji hubungan antar - makhluk hidup di dalam ekosistem, sedangkan feminisme merupakan teori yang berasal dari pemikiran dan gerakan atas dominasi laki-laki terhadap perempuan.

Ritzer (2014: 395) mengartikulasikan pemikiran Simone de Beauvoir dalam bukunya "*The Second Sex*" bahwa dunia dikonstruksi berdasarkan kultur dan pengalaman laki-laki. Dengan perkataan lain, dunia dengan dominasi ideologi patriarkinya mengasumsikan bahwa pengalaman tersebut menempatkan laki-laki sebagai subjek, sehingga kehidupan didefinisikan berdasarkan cara pandang laki-laki. Oleh karena itu,

perempuan dianggap sebagai 'the other' atau yang liyan. Hal tersebut tentunya secara langsung menyingkirkan pengalaman diri perempuan sehingga mengkonstruksikan perempuan sebagai makhluk yang diobjektifkan (*objectified*). Berdasarkan hal tersebut secara langsung mengungkapkan bahwa terdapat opresi kepada perempuan, atau menempatkan perempuan sebagai subordinasi.

Pelenyapan pengalaman atau 'nama-diri' tersebut merupakan realitas opresi terhadap perempuan yang membawa pemikiran baru terhadap pemaknaan kembali tentang relasi gender. Berdasarkan pemikiran Dorothy E. Smith (1990) dalam bukunya *The Conceptual Practices of Power: A Feminist Sociology of Knowledge* mengungkapkan bahwa feminisme perlu memperjuangkan kehadiran pengalaman perempuan di ranah publik. Bahkan, selama ini kejadian mengenai opresi terhadap perempuan sendiri masih didasarkan pada pengalaman laki-laki, tidak banyak yang dihasilkan berdasarkan pengalaman laki-laki. Dengan perkataan lain, perempuan masih menjadi objek yang secara umum didasarkan pada pengalaman kaum laki-laki. Smith (1990: 25-27) mengenalkan konsep *Bifurcation of Consciousness*, konsep ini memandang pentingnya untuk turut melibatkan pengetahuan dan pengalaman

perempuan untuk dijadikan sebuah dasar atas hadirnya sebuah kebijakan.

Selain itu, Smith (1990) mengungkapkan jika didasarkan pada fakta sosiologi, tentunya pengetahuan dan pengalaman perempuan berbeda di setiap daerah tempat mereka tinggal. Dengan perkataan lain, perjuangan perempuan atau gerakan perempuan tidak selalu dapat diuniversalitaskan. Ada pengalaman langsung perempuan yang tidak dialami oleh perempuan lainnya, yang oleh Alfred Schutz (dalam Rasid, 2021) disebut sebagai *phenomenal perspective*.

Alfred Schutz dan Edmund Husserl (dalam Rasid, 2021: 190) mengungkapkan bahwa dunia tidak hanya dipandang dalam realitas kehidupan sosial, melainkan mencakup realitas fantasi, realitas mimpi, dan realitas dirinya sendiri. Lebih jauh lagi, diungkapkan konsep Edmund Husserl '*zurück zu den sachen selbst*', artinya kembali kepada hal-hal itu sendiri, yakni metode untuk mengetahui fenomena secara murni, penting untuk kembali kepada kesadaran manusia itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut, tentunya peran pengetahuan perempuan dan pengalamannya menjadi hal penting untuk ditampilkan di ranah publik, yang dalam hal menyuarkan suara kritik atas perannya di dalam pengelolaan lingkungan yang masih bias.

Pengelolaan lingkungan sendiri selama ini terlihat masih bersifat antroposentris, yakni berpusat kepada manusia, atau dengan perkataan lain kehadiran alam dianggap untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia semata. Oleh karena itu, wajar jika terjadi eksploitasi ekstrim dilakukan oleh manusia karena cara pandangnya berdasarkan etika antroposentris. Capra (1997) dan Hughes (2000) mengatakan bahwa cara pandang tersebut tentunya menjadikan kegagalan dalam pembangunan berkelanjutan, karena manusia masih mementingkan dirinya sendiri dan merasa tidak memiliki tanggung jawab terhadap keberlangsungan alam.

Etika antroposentris ini didasarkan pada filsafat Cartesian dalam logika dualistik - mekanistik. Ketika cara pandang ini dijadikan sebagai dasar kebijakan, dengan menempatkan kepentingan manusia sebagai pertimbangan utama, maka hasil kebijakan tersebut bersifat parsial. Terlalu memanjakan manusia dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan hidup manusia tanpa memikirkan kompleksitas lingkungan. Persoalan lingkungan dianggap sebagai sesuatu yang sederhana, sehingga tidak sedikit kesalahan kebijakan dalam pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam. Lebih jauh lagi, Hull (yang dikutip oleh Abdoellah, 2017: 202) mengatakan bahwa “antroposentrisme yang menyebabkan manusia menjadi *homo economicus*,



manusia yang selalu menjadi kemakmuran ekonomis sebagai ukuran segala tindakannya.

Berdasarkan hal-hal yang disampaikan pada paragraf sebelumnya, dapat dikatakan bahwa baik perempuan dan lingkungan masih ditempatkan pada posisi yang sama, yaitu sebagai objek. Perempuan masih dianggap sebagai objek dari pembangunan dan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman laki-laki. Begitu pun dengan alam atau lingkungan yang ditempatkan sebagai objek yang kehadirannya semata untuk memenuhi kemakmuran hidup manusia yang didasarkan pada cara pandang laki-laki. Oleh karena itu, muncul gerakan ekofeminis melalui konsep ekofeminisme yang mencoba untuk memberikan keadilan agar perempuan dan lingkungan berada di posisi yang setara. Dengan perkataan lain, kehadiran pengetahuan dan pengalaman perempuan dalam pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam menjadi faktor penting agar dapat memperbaiki kegagalan dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Sebagaimana Warren yang dibahas oleh Lorentzen dan Eaton (dalam Priyatna, 2017: 440) mengatakan bahwa ekofeminisme merupakan terminologi yang mengawinkan konsep ekologi dan feminisme. Ia diibaratkan sebuah filosofi yang memayungi atau

menghubungkan keberagaman pendekatan feminisme dan lingkungan.

Terdapat beberapa aliran atau paham dari ekofeminisme itu sendiri. Arrivia (2002: 386-388) mengutip Rosemary Tong, mengatakan dengan lugas terdapat beberapa aliran pemikiran ekofeminisme. Pertama adalah Mary Daly (1990), merupakan lesbian feminis yang menolak budaya laki-laki karena dianggap merugikan budaya manusia secara keseluruhan. Ia lebih mengunggulkan budaya perempuan atau dapat disebut dengan matriarki. Budaya matriarki dianggap dapat lebih menjaga alam karena perempuan dianggap lebih mengutamakan kelembutan, kekompakan, dan relasi emosional dibandingkan budaya patriarki. Paham yang kedua yaitu paham yang dikemukakan oleh Susan Griffin (1979). Pahamnya memosisikan perempuan adalah sama dengan alam. Menurutnya hanya perempuan yang dapat melestarikan alam karena kecintaan mereka pada keberlangsungan hidup. Hal tersebut didasarkan pada sisi biologis perempuan yang dapat melahirkan, sehingga diasumsikan bahwa perempuan yang mengerti betul mengenai makna kehidupan.

Selain itu, ada paham ekofeminis spiritual Starhawk yang dicirikan melalui tiga pemikirannya, yaitu imanensi (kekuatan dari dalam diri yang

menghambat kehendak untuk menguasai); selanjutnya adalah keterhubungan (konektivitas antara badan dan jiwa atau pemikiran yang saling menyatu); lalu yang terakhir adalah cara hidup yang berperasaan (di sini menekankan kepada sifat untuk dapat saling mengasihi, mencintai dan merawat perasaan masing-masing). Pemikiran atau paham lainnya berasal dari Maria Mies dan Vandana Shiva yang menganggap bahwa sistem kapitalisme sudah mengakar pada kebudayaan barat sehingga menyuburkan penyebaran patriarki.

Warren (1997) mencoba mengelompokkan paham-paham dalam etika lingkungan, salah satunya mengkategorikan ekofeminisme termasuk ke dalam paradigma ekologi yang radikal. Sebagai paradigma ekologi yang radikal, ekofeminisme meleburkan batas-batas antara manusia dengan alam, tidak ada hirarki di dalam konsepnya. Bagi Arrivia (2002) ekofeminisme sendiri melihat bagaimana posisi perempuan sama halnya dengan alam, dianggap sebagai 'yang liyan'. Artinya, posisi alam sendiri dianggap sebagai objek yang bisa dieksploitasi secara bebas oleh manusia. Terdapat hirarki yang berupa dominasi manusia terhadap hewan, tanah, air, hutan, dan lain sebagainya, sebagaimana dominasi laki-laki terhadap perempuan, ataupun kepada kulit-kulit yang berwarna. Oleh karena itu, ekofeminisme menjadi sebuah perjuangan dalam membela hak-hak yang dimiliki oleh alam itu sendiri.

Bukan hanya melihat keterkaitan perempuan dengan alam melalui perjuangan yang dilakukannya, lebih jauh lagi ekofeminisme menjadi gerakan yang mencoba melawan - *ism of domination*.

Sekait dengan berbagai paham ekofeminisme di atas, hal tersebut bukan merupakan bagian yang perlu diperdebatkan secara panjang. Terdapat hal yang lebih penting daripada itu, yaitu pengikisan budaya patriarki karena dominatif yang berdampak eksploitatif, baik itu terhadap perempuan maupun alam. Selain itu, perlu perbaikan arah pembangunan ke arah yang lebih humanis dan ekologis, sehingga diperlukan pergeseran kebijakan yang mengarah kepada paradigma pembangunan yang berpusat kepada manusia. Tidak lagi dominan bergantung kepada paradigma pertumbuhan ekonomi, ataupun kesejahteraan, melainkan beralih ke paradigma pemberdayaan yang berpusat kepada manusia, atau dikenal dengan *People Centered Development*. Manusia dijadikan sebagai subjek sekaligus objek dari pembangunan. Dalam hal ini perempuan menjadi subjek dari pembangunan itu sendiri, sehingga terjadi pemerataan dan juga terjaganya keberlangsungan lingkungan.

### 2.3. Pemberdayaan dan Pembangunan Berkelanjutan

Paradigma pembangunan yang berpusat kepada manusia bertujuan agar manusia dapat mandiri dan berdaya melalui dirinya sendiri, sehingga tidak bergantung kepada pihak lain. Paradigma ini dapat memberikan tempat yang penting bagi prakarsa dan keragaman lokal, serta menekankan pentingnya masyarakat lokal yang mandiri (Jamaludin, yang dikutip oleh Nur, 2021: 27). Dalam prosesnya masyarakat berperan aktif dalam proses pembangunan, ia bukan menjadi objek melainkan subjek dari pembangunan itu sendiri. Dengan perkataan lain, baik itu pemerintah ataupun pihak luar hanya berperan sebagai katalisator dan fasilitator bagi masyarakat melalui proses pendampingan pemberdayaan secara penuh hingga masyarakat memiliki kemandirian secara utuh.

Pembangunan yang berpusat kepada manusia ini lebih menekankan kepada proses pembelajaran dan pemberdayaan kepada masyarakat, bukan berbentuk *charity*/hibah/bantuan langsung. Ife (1995) mengatakan bahwa:

*“Empowerment is a process of helping disadvantaged groups and individual to compete more effectively with other interests, by helping them to learn and use in*

*lobbying, using the media, engaging in political action, understanding how to 'work the system,' and so on”*

Berdasarkan yang disampaikan oleh Ife, pemberdayaan merupakan pemberian keleluasaan bagi mereka yang tidak beruntung/berdaya agar dapat membantu dirinya sendiri lepas dari ketidakberdayaan tersebut menjadi masyarakat yang berdaya. Hal tersebut tentunya dapat dicapai melalui otonomi, pemberian wewenang, dan kepercayaan kepada setiap individu agar terlepas dari ketidakberdayaan yang dihadapi. Sebagaimana Suharto (2009: 99) mengemukakan bahwa, konsep pemberdayaan masyarakat merupakan paradigma baru dalam pembangunan, paradigma yang bersifat *people centered* (berpusat kepada manusia), *participatory* (partisipatif), *empowering* (memberdayakan), dan *sustainable* (berkesinambungan/berkelanjutan). Artinya kemandirian masyarakat menjadi tujuan pokok dari pembangunan, sehingga masyarakat tidak ketergantungan kepada pemerintah atau bahkan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan itu sendiri.

Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, keterlibatan perempuan melalui pengetahuan dan pengalaman dirinya menjadi penting untuk turut dihadirkan ke ranah publik. Sebab, selama ini hampir

setiap pemberdayaan yang dilakukan didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman laki-laki. Kehadiran perempuan hanya berperan sebagai objek dari pemberdayaan yang dilakukan, karena kegiatan tersebut tidak didasarkan pada kebutuhan perempuan di daerah pemberdayaan tersebut, melainkan program yang sudah dirancang dan dibawa oleh pelaku intervensi kepada masyarakat (perempuan) untuk kemudian dilaksanakan. Hal tersebut ditengarai tidak tepat sasaran, karena pemberdayaannya tidak didasarkan pada kebutuhan masyarakat tersebut.

Selain itu, kegiatan pemberdayaan semestinya dapat memberikan kemandirian penuh bagi masyarakat untuk dapat mengubah keadaan mereka yang tidak beruntung menjadi lebih baik lagi. Akan tetapi, pada faktanya hampir kegiatan pembangunan didasarkan pada pemenuhan kebutuhan dasar (*hit and run*), baik yang dilakukan oleh lembaga pemerintah, lembaga swasta, maupun lembaga sosial (NGO). Dampaknya, masyarakat ketergantungan terhadap hibah yang diberikan oleh lembaga pemerintah, lembaga swasta, maupun lembaga sosial (NGO). Oleh karena itu, masyarakat seharusnya berperan sebagai subjek dan objek dari pembangunan. Masyarakat sebagai subjek yaitu menjadi pelaku utama dari pembangunan itu sendiri. Mereka menjadi pelaku utama dalam keseluruhan proses pemberdayaan tersebut, mulai dari

analisis masalah atau sumber daya sampai dengan selesainya program. Di samping itu, masyarakat menjadi objek dari pembangunan karena dari pemberdayaan yang dilakukan, mereka tentunya menerima manfaat secara langsung dari hal tersebut.

Sekait dengan uraian-uraian di atas, kegiatan pemberdayaan dapat menjadi kunci dalam menyukseskan agenda pembangunan yang berkelanjutan, khususnya kesetaraan gender dan kelestarian alam. Perempuan sudah sepatutnya selalu dilibatkan dalam proses pembangunan itu sendiri, tidak hanya melibatkan laki-laki. Pelibatan perempuan dalam perencanaan, perumusan kebijakan, pelaksanaan kegiatan, pun dalam evaluasi menjadi faktor penting. Hal-hal tersebut tentunya merupakan implementasi dari kesetaraan gender, yang mana perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam proses dan penentu kebijakan dalam pembangunan melalui pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam.



## BAB III

### OBJEK DAN METODE PENELITIAN

#### 3.1. Objek Penelitian

Objek penelitian pada kajian ini yakni tiga hal, (1) program pembangunan berkelanjutan di Provinsi Banten; (2) LAZ Harfa; dan (3) fasilitator lapangan dan penerima manfaat program LAZ Harfa yang berjenis kelamin perempuan.

Dalam program pembangunan di Provinsi Banten tentunya melibatkan banyak pihak yang berkaitan erat dengan SDGs. Adapun beberapa lembaga yang menjadi sasaran penelitiannya adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Banten, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Provinsi Banten.

Selain itu, LAZ Harfa sebagai organisasi nonprofit menjadi bagian penting untuk mengetahui keterlibatan mereka melalui program pemberdayaan yang berkaitan erat dengan perempuan dan lingkungan, baik itu dilihat dari sudut pandang pelaksana program, maupun para penerima manfaat program tersebut.

### **3.2. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang didasarkan pada etnometodologi. Pemilihan metode ini berdasarkan identifikasi masalah dan tujuan penelitian yang diajukan.

Menurut Sukmadinata (2020:14), “dasar penelitian kualitatif adalah konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh setiap individu. Penelitian kualitatif percaya bahwa kebenaran adalah dinamis dan dapat ditemukan hanya melalui penelaahan terhadap orang-orang melalui interaksinya dengan situasi sosial mereka”. Sejalan dengan Sugiyono (2005: 53), ia mengatakan bahwa penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Selain itu, penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Berdasarkan hal-hal tersebut dapat dikatakan bahwa penelitian kualitatif lebih menitikberatkan pada keutuhan penelitian atau entitas. Dengan perkataan lain individu dalam penelitian tidak dipandang secara parsial saja, melainkan fenomena

kebudayaan berdasarkan kelompok atau kolektif masyarakat individu tersebut tinggal.

Metode penelitian kualitatif ini sejalan dengan etnometodologi. Garfinkel sebagaimana yang dikutip Coulon (2008: 28) mengemukakan, etnometodologi adalah sebuah aliran sosiologi yang “berusaha mengkaji kegiatan-kegiatan praktis, dan penalaran sosiologi praktis sebagai subjek penelitian empiris dengan dikaitkan pada kegiatan biasa kehidupan sehari-hari, perhatian yang sama biasanya dikaitkan kejadian-kejadian yang luar biasa, yang kita coba pahami sebagai gejala-gejala yang semestinya”. Menurut Coulon (2008: 44), dalam etnometodologi terdapat sebuah istilah yang disebut dengan *accountability*. Dalam hal ini, etnometodologi berusaha untuk mendefinisikan dan menteorisasikan istilah tersebut, *accounts* adalah yang memberi informasi (*informants*) atau juga yang menstruktur (*structurans*) situasi pengujaran.

Sejalan dengan pengertian pada paragraf sebelumnya, Zimmerman sebagaimana dikutip Coulon (2008) mengutarakan bahwa “etnometodologi bekerja untuk mengkaji ulasan tentang dunia sosial yang dilakukan para anggota sebagai pelaksanaan dalam situasi, bukan sebagai penanda-penanda dari yang sedang terjadi. Perhatian etnometodologi secara umum adalah untuk menjelaskan tentang bagaimana ulasan,

atau deskripsi suatu kejadian, suatu relasi atau sesuatu yang dihasilkan dalam interaksi” (Coulon, 2008: 49).

Berdasarkan uraian di atas, etnometodologi dapat diartikan sebagai sebuah metode penelitian untuk menjelaskan suatu kejadian yang dialami oleh manusia sebagai sebuah praktik sehari-hari, dan dilihat berdasarkan hal-hal yang disampaikan oleh informan dan situasi sosialnya. Adapun pendekatan yang dilakukan yaitu melalui studi kasus. Menurut Endraswara (2006: 77), melalui studi kasus permasalahan budaya akan terangkat ke permukaan, dan selanjutnya dapat diketahui publik. Faisal (2005) juga mengemukakan, “studi kasus merupakan tipe pendekatan dalam penelitian yang penelaahannya kepada satu kasus dilakukan secara intensif, mendalam, mendetail, dan komprehensif. Studi kasus biasa dilakukan terhadap individu, seperti lazimnya dilakukan oleh para ahli psikologi analisis; juga biasa dilakukan terhadap kelompok, seperti yang dilakukan oleh ahli Antropologi, Sosiologi, dan Psikologi Sosial” (Faisal, 2005: 22).

Studi kasus adalah uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas) suatu program, atau suatu situasi sosial selama kurun waktu tertentu (Maulana, 2004: 201). Pendekatan

melalui studi kasus ini bertujuan untuk menerangkan keterangan, pernyataan berdasarkan fakta. Hal tersebut sejalan dengan Faisal (2005: 22) yang menjelaskan bahwa “studi kasus ini dapat melahirkan pernyataan-pernyataan yang bersifat eksplanasi. Akan tetapi “eksplanasi” tersebut tidak dapat diangkat sebagai sebuah generalisasi.” Dengan perkataan lain, kejadian, fakta, atau kasus yang diterangkan dan dijelaskan tersebut tidak dapat diangkat sebagai kasus yang universal atau sama di individu atau kelompok-kelompok lainnya.

Adapun pendekatan studi kasus yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan dua model studi kasus, yaitu studi kasus *retrospektif* dan studi kasus *prospektif*. Endraswara (2006) mengemukakan, “studi kasus pertama, bersifat kuratif, dan disebut studi *kasus retrospektif* - yang memungkinkan ada tindak lanjut penyembuhan. Sedangkan studi kasus kedua, disebut studi *kasus prospektif* - diperlukan untuk menemukan kecenderungan dan arah perkembangan budaya (Endraswara, 2006: 79). Studi kasus *restrospektif* dipahami sebagai metode penelitian yang bekerja mundur. Dengan perkataan lain dilakukan dengan meneliti kasus/kejadian yang terjadi pada masa lampau. Adapun studi kasus *prospektif* dipahami sebagai

kegiatan penelitian yang dilakukan dengan menelaah kejadian yang terjadi pada saat ini.

Penggabungan dua studi kasus ini berhubungan dengan keterbatasan waktu penelitian dalam penelitian studi kasus prospektif, karena dalam penelitian studi kasus diperlukan waktu yang cukup lama untuk pengambilan data. Endraswara (2006: 79) mengatakan bahwa studi kasus sering disebut juga studi *longitudinal*, yang memerlukan waktu tertentu (lama) dalam pengambilan data. Oleh karena itu, dalam penelitian ini digabungkan antara studi kasus retrospektif dan studi kasus prospektif. Fokus kedua studi kasus dalam penelitian ini adalah hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya praktik homoseksual, manifestasi praktik-praktik tersebut di pesantren, dan individu santri yang teridentifikasi dan agau mengidentifikasi dirinya sebagai homoseksual.

Adapun teknik yang dilakukan untuk memperoleh data dalam penelitian ini di antaranya ialah:

a. Observasi Lapangan

Observasi lapangan dimaksudkan untuk melihat secara langsung keadaan, baik itu lokasi maupun penerima manfaat/program pemberdayaan, juga melihat metode pelaksanaan program-program yang dilaksanakan.

b. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini lebih menekankan kepada wawancara yang mendalam. Teknik wawancara dilakukan untuk mendapatkan data berdasarkan studi kasus retrospektif dan juga prospektif. Dalam wawancara studi kasus retrospektif dibatasi hanya sampai kegiatan pemberdayaan pada tahun 2015, sesuai dengan dideklarasikannya TPB.

c. Otobiografi

Metode/teknik otobiografi ini dikutip dari artikel jurnal yang dibuat oleh Priyatna (2013). Cara kerja dari metode ini adalah mengalihkan pengalaman diri ke dalam tulisan. Tulisan-tulisan tersebut dibuat ke dalam bentuk narasi, sehingga tulisan-tulisan tersebut memberikan refleksi bagi partisipan, dan objek yang menjadi partisipan lebih nyaman untuk berbagi pengalamannya. Selain daripada itu, Smith dan Watson, sebagaimana dikutip Priyatna (2013) mengemukakan bahwa tulisan yang dibuat juga dapat ditulis sesuai kehendaknya, memungkinkan bagi partisipan

yang bercerita untuk mengulang cerita atau merevisi apa yang ingin ia ceritakan.

Priyatna (2013) mengatakan bahwa dalam bahasa Indonesia metode ini lebih dikenal dengan sebutan ‘curhat’. Chanfrault-Duchet sebagaimana dikutip Priyatna (2013: 105) mengungkapkan bahwa melalui metode ini data yang akan diperoleh pun akan lebih dalam, selain karena partisipan merasa lebih nyaman dalam bercerita. Dikatakan juga bahwa tulisan itu sendiri dapat merepresentasikan diri yang bercerita dan juga lingkungan sosialnya.

Teknik otobiografi ini sejalan dengan model analisis *life history*. Endraswara (2006) mengemukakan bahwa “dengan mempelajari data pengalaman individu dalam suatu komunitas, peneliti akan memperoleh informasi yang jauh lebih dalam mengenai subjek penelitian. Fungsi data pengalaman individu dalam analisis budaya, antara lain: “(a) untuk memperoleh pandangan dari dalam individu ,mengenai gejala-gejala sosial dalam suatu komunitas budaya; (b) untuk memperoleh gambaran tentang individu yang suka menyimpang (devian individual) dalam



sebuah komunitas budaya; (c) untuk memperoleh data lebih dalam tentang individu yang mungkin sulit diungkap ketika observasi dari luar; untuk memperoleh gambaran sikap dan tingkah laku yang mungkin sulit diceritakan melalui wawancara langsung” (Endraswara, 2006: 87-88).

Alfred Schutz dan Edmund Husserl (dalam Rased, 2021: 190) mengungkapkan bahwa dunia tidak hanya dipandang dalam realitas kehidupan sosial, melainkan mencakup realitas fantasi, realitas mimpi, dan realitas dirinya sendiri. Lebih jauh lagi, diungkapkan konsep Edmund Husserl ‘*zurück zu den sachen selbst*’, artinya kembali kepada hal-hal itu sendiri, yakni metode untuk mengetahui fenomena secara murni, penting untuk kembali kepada kesadaran manusia itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut, tentunya peran pengetahuan perempuan dan pengalamannya menjadi hal penting untuk ditampilkan di ranah publik, yang dalam hal menyuarkan suara kritik atas perannya di dalam pengelolaan lingkungan yang masih bias.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### 4.1. Provinsi Banten dan *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan, yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi, dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Laut; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan

Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Pemerintah Provinsi Banten bersama dengan berbagai pihak baik lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah yang meliputi akademisi, CSO, filantropi, dan pelaku usaha, serta didukung parlemen berkomitmen mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) di Provinsi Banten. Komitmen atas pelaksanaan kesepakatan global tersebut dituangkan dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Banten Tahun 2020-2022.

Kemudian, sebagai bentuk pertanggung jawaban, setiap tahunnya Gubernur Provinsi Banten menyampaikan laporan evaluasi pelaksanaan TPB/SDGs daerah kepada Menteri Dalam Negeri. Hal tersebut merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017.

---

## **Indeks Pembangunan Gender**

Gender merupakan isu multidimensi yang tercantum di hampir seluruh Tujuan dalam TPB. Evaluasi hasil pembangunan yang berperspektif gender menggunakan dua indikator utama, yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

IPG merupakan perbandingan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) laki-laki dan IPM perempuan dilihat dari kualitas dimensi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dimensi Pendidikan menggunakan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, dimensi kesehatan menggunakan umur harapan hidup, serta dimensi ekonomi menggunakan pengeluaran per kapita disesuaikan. Pada tahun 2020, IPG Provinsi Banten adalah 91,74. Semakin mendekati 100, angka IPG menunjukkan bahwa pencapaian pembangunan perempuan hampir sama dengan laki-laki.

IPG Provinsi Banten sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan IPG Indonesia secara keseluruhan. IPG Indonesia tahun 2020 berada di angka 91,06. Menurut Kementerian PPPA (2020), IPG dapat diklasifikasikan menjadi 2 kategori, yaitu IPG Rendah jika nilai IPG kurang dari 90,00, dan IPG tinggi jika nilai IPG lebih besar atau sama dengan 90,00. Pada tahun 2020, terdapat 18 provinsi di Indonesia dengan nilai IPG di bawah rata-rata nasional. Sedangkan Provinsi Banten masuk dalam kategori IPG tinggi, dengan nilai IPG di atas rata-rata Nasional.

IDG digunakan untuk mengukur partisipasi aktif perempuan di bidang ekonomi, politik dan manajerial. Tiga indikator yang digunakan yaitu persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, keterlibatan perempuan di parlemen, dan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan

sebagai tenaga manajerial, professional, administrasi, dan teknisi. Tren capaian IDG Provinsi Banten dibandingkan dengan target dalam RAD TPB, disajikan dalam grafik berikut:



Gambar 4.1 Capaian IDG Provinsi Banten

Sumber : RAD TPB, BPS, diolah

Berdasarkan grafik, terlihat bahwa capaian IDG Provinsi Banten pada Tahun 2017 dan 2018 telah melebihi target. Namun demikian, capaian IDG menurun signifikan menjadi 68,83 pada Tahun 2019, dan turun menjadi 68,76 pada tahun 2020. Penurunan IDG ini juga tercermin dari penurunan komponen pembentuk IDG, terutama pada sub tujuan Proporsi perempuan yang berada di posisi manajerial dan sub tujuan Persentase Peningkatan Kontribusi

Perempuan Di Bidang Ekonomi yang masih belum mencapai target kinerja yang diharapkan.

Pada sub tujuan peningkatan kontribusi perempuan di Bidang Ekonomi Provinsi Banten menargetkan adanya peningkatan sebesar 32,13% pada tahun 2020. Namun realisasi di lapangan, terjadi peningkatan sebesar 31,29, sedikit di bawah target yang dicanangkan. Sub tujuan ini menunjukkan bagaimana kontribusi perempuan dalam pendapatan. Besarnya peningkatan kontribusi perempuan di bidang ekonomi bisa menjadi gambaran bagaimana peran perempuan di sektor-sektor ekonomi, baik itu usaha kecil maupun usaha menengah.

Angka IDG provinsi Banten masih berada di bawah angka IDG rata-rata nasional, yaitu 72,10 pada tahun 2019, dan 75,57 pada tahun 2020. pada tahun 2020 Angka IDG jauh lebih baik jika dibandingkan dengan angka IDG beberapa provinsi lain, seperti NTB, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Namun, jika dibandingkan dengan provinsi lain yang berada di Pulau Jawa, Angka IDG Provinsi Banten menjadi yang terendah.

Angka IDG Provinsi Banten yang masih di bawah rata-rata IDG Nasional menunjukkan bahwa pemberdayaan Gender di Banten masih perlu ditingkatkan. peningkatan pemberdayaan Perempuan membutuhkan upaya banyak pihak, tidak hanya Pemerintah, namun juga segenap masyarakat provinsi Banten. Keberadaan lembaga-lembaga

Non-Profit atau NGO masih sangat dibutuhkan untuk ikut membangun masyarakat. Pemberdayaan masyarakat secara umum, dan pemberdayaan perempuan secara lebih khusus terbukti sangat dipengaruhi oleh kontribusi berbagai kalangan, swasta maupun pemerintah.

## **4.2. LAZ Harfa, Pemberdayaan Perempuan, dan Lingkungan**

Bagian ini memaparkan bagaimana peran dan aktivitas LAZ Harfa dalam melakukan pemberdayaan perempuan dan lingkungan. Ditampilkan juga arah aktivitas dan program LAZ Harfa yang saat ini sedang berfokus untuk turut membantu pemerintah mensukseskan SDGs. Selain itu, terlihat pula program yang dilaksanakannya cenderung efektif untuk mensukseskan SDGs. Selain menggunakan metode yang mutakhir, programnya cenderung integratif sehingga dapat mensinergikan antara satu tujuan SDGs dengan tujuan yang lainnya.

### **4.2.1 Lembaga Amil Zakat Harapan Dhuafa (LAZ Harfa)**

Lembaga Amil Zakat Harapan Dhuafa atau yang lebih dikenal dengan LAZ Harfa merupakan organisasi nonprofit (NGO) yang bertempat di Provinsi Banten. Kehadiran LAZ Harfa tentunya sebagai salah satu bentuk dukungan masyarakat untuk membantu pemerintah dalam

menyelesaikan masalah-masalah sosial dan lingkungan. Lebih dari itu, LAZ Harfa sendiri banyak memfokuskan program untuk turut mendukung mensukseskan SDGs. Hal tersebut terlihat jelas dari profil lembaga di laman resminya, dan juga program-program yang mereka jalankan. Adapun fokus program yang dilaksanakan di antaranya di bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang sosial dan dakwah, *disaster and humanitarian relief*, program pemberdayaan, bidang ekonomi, dan program khusus.

Sebagai lembaga non profit yang bergerak membantu pemerintah dalam melakukan pengembangan terhadap masyarakat, ia dapat diasumsikan berbeda daripada lembaga non profit lainnya, *Corporate Social Responsibility* (CSR), atau bahkan lembaga pemerintah yang mayoritas berfokus pada pemberian hibah untuk memenuhi kebutuhan dasar saja. Sebagaimana yang disampaikan sebelumnya, pemilihan paradigma pembangunan masih banyak yang digunakan saat ini yakni paradigma *charity*. Pada beberapa kasus mungkin paradigma tersebut bisa tepat sasaran, misalkan dalam kebencanaan. Akan tetapi, jika hal tersebut diterapkan ke dalam berbagai program kesejahteraan tentunya tidak tepat sasaran.

Melalui paradigma tersebut mungkin masyarakat miskin akan tertanggulangi dengan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT), tetapi hal itu hanya sesaat. Di kemudian hari masyarakat tersebut akan tetap menjadi



miskin karena ketergantungan terhadap pemberian lembaga pemerintah atau swasta. Bantuan hibah pemerintah akan menjadi alasan bagi masyarakat untuk berkembang mencari penghasilan agar hidupnya tersejahterakan oleh dirinya sendiri, atau dikatakan mandiri. Oleh karena itu, LAZ Harfa memilih paradigma yang lain, yaitu paradigma *People Centered Development* atau yang dikenal dengan pengembangan yang berpusat kepada manusia. Paradigma ini menitikberatkan pada pemberdayaan manusia dengan cara merubah cara pandang penerima manfaat agar dapat merubah dirinya sendiri dengan memaksimalkan potensi diri dan sumber daya alam.

Salah satu bentuk pengembangan masyarakat yang dilakukan adalah pengembangan masyarakat yang berbasis gender, atau pengembangan perempuan. Pengembangan perempuan tidak hanya tergambar dari program yang dilaksanakan oleh LAZ Harfa, tetapi juga tergambar dalam struktur organisasi LAZ Harfa. Menurut Direktur Program dan Kemitraan LAZ Harfa, Mamak Jamaksari, secara segmentasi karyawan LAZ Harfa dibagi ke dalam dua segmen atau dua area kerja. Kelompok pertama, karyawan yang beraktifitas di Kantor LAZ Harfa sebagai tenaga administrasi dan operasional, yang disebut Amil. komposisi amil perempuan berada di angka 35% dari total amil yang ada di LAZ Harfa.

“jadi kalau rekrutmen kan ada berapa segmentasi bagi karyawan atau amil, kalau yang di kantor proporsi perempuan itu lebih banyak. sekarang mencapai 65% berbanding 35%”

Kelompok Kedua, yaitu tenaga pendamping lapangan atau *Field Fasilitator*. Proporsi perempuan untuk tenaga pendamping lapangan minimal 3 dari 10 orang, atau 30% dari total fasilitator lapangan adalah perempuan.

“kalau di lapangan, fasilitator lapangan dulu itu ada standar minimal kecukupan 30%, pokoknya tidak boleh kurang dari 3 dari sepuluh. tapi pada perkembangannya pada tahun lalu malah *fifty fifty* (50 : 50)”

Secara kebijakan, Yayasan Harapan Dhuafa menunjukkan keberpihakan terhadap perempuan. Hal tersebut terlihat dalam proses perekrutan tenaga lapangan, dimana LAZ Harfa tidak hanya menerapkan keberpihakan terhadap perempuan, namun juga pengarus utamaan Gender yang dituangkan dalam peraturan yayasan. Komposisi pekerja perempuan di LAZ Harfa tidak hanya sebatas pemenuhan keterwakilan perempuan, tetapi perempuan juga diberi peran lebih.

“kalau dulu kan yang penting perempuan terwakili, itu hanya basic, tetapi bagaimana ditingkatkan

menjadi pembagian peran yang lebih besar bagi perempuan”

Secara lebih jelas, komposisi amil pada LAZ Harfa dapat dilihat pada Data AMIL di bawah ini :

DATA ANIL LAZ HAR PA BANTEN

TAHUN 2022

NO	NAMA	NAMA - GELAR	JENIS KELAMIN	KATEGORI	DIVISI UMUM
1	Indah Prihantani	Indah Prihantani, SE, Ak.	P	Direksi	Manajemen
2	Irfan	Irfan, SE	L	Manajemen	Manajemen
3	Muhammad Mulya	Muhammad Mulya, S.Pd	L	Manajemen	Manajemen
4	Nani Marlina	Nani Marlina, S.Pd	P	Fondasi	Keagamaan
5	Marjaya	Marjaya, S.Pd.	L	Adm dan Keuangan	SDM dan Umum
6	Sopan	Sopan, S.Pd	L	Penghangatan	Fundasi
7	Abdullah Mulyanullah	Abdullah Mulyanullah, SE	L	Fondasi	Keagamaan
8	Imam Mulyati	Imam Mulyati	L	Manajemen	Manajemen
9	Rini Khoirini	Rini Khoirini, SE	P	Penghangatan	Fundasi
10	Ery Syahidi	Ery Syahidi, S.Sos.	P	Lain-Lain	Badan
11	Anis Khairunnisa	Anis Khairunnisa, A.Md.IK.	P	Penghangatan	Fundasi
12	Muhammad Yusuf Fadhil	Muhammad Yusuf Fadhil	L	Lain-Lain	Mutasi
13	Mulyatin	Mulyatin	L	Adm dan Keuangan	SDM dan Umum
14	Sugandi	Sugandi, S.M.	L	Penghangatan	Fundasi
15	Shinta Octaviani	Shinta Octaviani	P	Adm dan Keuangan	Keuangan
16	Tema Anif Prihanta	Tema Anif Prihanta	L	Lain-Lain	Mutasi
17	Rozamawati	Rozamawati	P	Adm dan Keuangan	Keuangan
18	Riki Herawan	Riki Herawan, S.Kom.	L	Penghangatan	CRM
19	Anggia Ramanda	Anggia Ramanda, S.P.	P	Fondasi	Keagamaan
20	Van Triha Mula	Van Triha Mula, S.P.	L	Lain-Lain	Badan
21	Toya Saefadi	Toya Saefadi, S.Ak.	L	Adm dan Keuangan	Keuangan
22	Sana	Sana	L	Penghangatan	Fundasi
23	Muhammad Jumiati	Muhammad Jumiati, S.Pd.	L	Penghangatan	Fundasi
24	Mistal Chamae	Mistal Chamae, SE	P	Penghangatan	Fundasi
25	Ranidi Maulana Yusuf	Ranidi Maulana Yusuf	L	Lain-Lain	Mutasi
26	Iman Putri Octaviana	Iman Putri Octaviana, S.Ak.	P	Adm dan Keuangan	Keuangan
27	Eka Sababilla Thahira	Eka Sababilla Thahira	P	Lain-Lain	Badan
28	Rokira Dwi Permata	Rokira Dwi Permata	L	Lain-Lain	Mutasi
29	Sugarnan	Sugarnan, SE	L	Penghangatan	Fundasi
30	Irfan Gus Priatama	Irfan Gus Priatama, SE	L	Penghangatan	IT dan Digfand
31	Han Agriyana	Han Agriyana	L	Lain-Lain	Mutasi
32	Vivi Patricia	Vivi Patricia, A.Md.PjK.	P	Lain-Lain	Mutasi
33	Marnik Jurnakari	Marnik Jurnakari, S.Sos, M.Kes.	L	Direksi	Manajemen
34	Sopran	Sopran, SE	L	Penghangatan	Fundasi
35	Sofiah Khalqiyah	Sofiah Khalqiyah, SE	P	Penghangatan	Fundasi
36	Wahyudin	Wahyudin, S.Pd.	L	Lain-Lain	Mutasi
37	Haifi Mujabidin	Haifi Mujabidin, S.I.Kom.	P	Lain-Lain	Mutasi
38	Dadun Avvaladin	Dadun Avvaladin, S.Pd.	L	Lain-Lain	Mutasi
39	Sinajudin Abbas	Sinajudin Abbas, S.Sos.	L	Lain-Lain	Mutasi
40	Gita Tara Marhaya Putri	Gita Tara Marhaya Putri	P	Penghangatan	CRM
41	Syarifah Zik Nurhidayah	Syarifah Zik Nurhidayah	P	Lain-Lain	Keuangan
42	Choirunnisa	Choirunnisa	P	Adm dan Keuangan	Keuangan
43	Novita Melani	Novita Melani	P	Penyeganaan	FF
44	TE. Moehamad Ivan Fauzi	TE. Moehamad Ivan Fauzi, S.ID.	L	Penyeganaan	FF
45	Yulka Kurniah	Yulka Kurniah	P	Adm dan Keuangan	Keuangan
46	Rozamawati	Rozamawati, S.Ak.	P	Adm dan Keuangan	Keuangan
47	Siti Choirunnisa	Siti Choirunnisa	P	Adm dan Keuangan	Keuangan
48	Fira Safinatunnajah	Fira Safinatunnajah, S.Ds.	P	Lain-Lain	Mutasi
49	Moehamad Andrian Maulana	Moehamad Andrian Maulana	L	Fondasi	IT dan Digfand
50	Kholmatul Fardiah	Kholmatul Fardiah, S.Sos.	P	Penghangatan	CRM
51	Muhammad Abdur Robbani	Muhammad Abdur Robbani	L	Lain-Lain	Mutasi
52	Indah Badiah	Indah Badiah, S.Pd.	P	Fondasi	Keagamaan
53	Muhammad Ary Sugitan Hadi	Muhammad Ary Sugitan Hadi	L	Lain-Lain	IT dan Digfand

54	Siti Holijah	Siti Holijah	P	Adm dan Keuangan	SDM dan Umum
55	Amah	Amah S. Sos	P	Lain-Lain	CRM
56	Muhammad Aditya	Muhammad Aditya	L	Pendistribusian	Program
57	Muhammad Fajri	Muhammad Fajri, S.H	L	Pendistribusian	Program
58	Mek. Maksum	Mek. Maksum, S.TP	L	Penyayanan	FF
59	Jackni	Jackni, S. Sos	L	Lain-Lain	Medikom
60	Nugra	Nugra, S.M.	P	Pendistribusian	Progrsv
61	M. Ghanjar Ima	M. Ghanjar Ima, S.I.Kom	L	Pengembangan	Fundraising
62	Anif Budinawan	Anif Budinawan	L	Pengembangan	Fundraising
63	Miska Ranti	Miska Ranti	P	Adm dan Keuangan	Keuangan
64	Havimah Khairunnisa	Havimah Khairunnisa, S. Sos	P	Lain-Lain	Medikom
65	Mila Devi Lestawati	Mila Devi Lestawati, S.Pd	P	Pendistribusian	Program
66	Yusuf Pujatno	Yusuf Pujatno	L	Pengembangan	Fundraising
67	Almasidah	Almasidah, S.I.P	P	Pengembangan	CRM
68	Agrani	Agrani, S.Pd	P	Pengembangan	CRM
69	Sheila Samika	Sheila Samika, S.E	P	Pengembangan	Fundraising
70	Wahyudin	Wahyudin	L	Adm dan Keuangan	SDM dan Umum
71	Ade Han Setiawan	Ade Han Setiawan, S.E	L	Penyayanan	Program
72	Fajar Rosana	Fajar Rosana, S.E	L	Penyayanan	Program
73	Fina Septiani	Fina Septiani, BH	P	Lain-Lain	Medikom
74	Nurham Supriyadi	Nurham Supriyadi, S.M.	L	Pendistribusian	Medikom
75	Adnan Sabudin Aji	Adnan Sabudin Aji, S.P	L	Pengembangan	Fundraising
76	Muhammad Fadhilah	Muhammad Fadhilah, S.I.Kom	L	Lain-Lain	SDM dan Umum
77	Naklita Rizkyra	Naklita Rizkyra	P	Adm dan Keuangan	SDM dan Umum
78	Siti Saadah	Siti Saadah	P	Adm dan Keuangan	SDM dan Umum
79	Dian Wardana	Dian Wardana, S.Pd	L	Penyayanan	Program
80	Helen Lestari	Helen Lestari, S.Pd	P	Penyayanan	Program
81	Naman	Naman, S.Pd	L	Penyayanan	Program
82	Aldi Sutisno	Aldi Sutisno	L	Penyayanan	Program
83	Mek. Tarnan Maulana	Mek. Tarnan Maulana	L	Penyayanan	Program
84	Tarwiyah	Tarwiyah, S.Pd	P	Penyayanan	Program
85	Alvin Nur Febriyan	Alvin Nur Febriyan	L	Adm dan Keuangan	SDM dan Umum
86	Siti Rahmah Darmayanti	Siti Rahmah Darmayanti	P	Penyayanan	Program

Mamak Jamaksari, Direktur Program dan Kemitraan LAZ Harfa, juga menyampaikan bahwa ada alasan tersendiri mengapa LAZ Harfa lebih memprioritaskan perekrutan tenaga perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Secara administrasi, perempuan lebih rapi jika dibandingkan dengan tenaga lapangan laki-laki. selain itu, ketuntasan program yang dilakukan oleh perempuan juga tidak kalah jika dibandingkan dengan program yang didampingi oleh tenaga lapangan laki-laki.

“pekerjaan di lapangan ada dua jenis, ada yang lebih administratif dan ada yang bersifat eksekusi di lapangan. memang secara eksekusi lapangan, pendamping lapangan laki-laki lebih fleksibel dan dalam program tertentu laki-laki lebih mudah adaptasi, tapi dari segi administratif perempuan lebih rapi dan lebih *gercep*”

Corak program yang dilaksanakan LAZ Harfa juga membutuhkan tenaga pendamping lapangan perempuan. Program yang dilaksanakan LAZ Harfa, misalnya Kelompok Keuangan Mikro, tahun-tahun terakhir difokuskan kepada penerima manfaat dari kaum perempuan. Dengan adanya tenaga pendamping perempuan, program KKM berbasis Perempuan lebih mudah dilaksanakan karena pendekatan yang dilakukan pendamping perempuan lebih gampang diterima penerima manfaat dari kaum perempuan.

“mengapa perempuan? karena secara program sekarang banyak program-program yang memang menysasar kaum perempuan kayak KKM BP (berbasis Perempuan) jadi pendamping perempuan lebih mudah merangkul penerima manfaat. ditambah ada permintaan khusus dari mitra kita terkait isu GEDSI (Gender Disabilitas dan Inklusi Sosial)”

Keberpihakan yang ditunjukkan LAZ Harfa terhadap perempuan bukannya tanpa kendala. Dalam prakteknya banyak calon tenaga pendamping lapangan yang mengundurkan diri , bahkan sebelum resmi diterima sebagai tenaga pendamping di LAZ Harfa. sebagian besar

alasan pengunduran diri adalah izin dari pihak orang tua. Karena itulah, LAZ Harfa menerapkan kebijakan menunjukkan persetujuan orang tua bagi pelamar dari kaum perempuan yang diterima sebagai pendamping lapangan.

Kebijakan Yayasan Harapan Dhuafa tidak hanya tercermin dalam komposisi tenaga pendamping lapangan dan Amil. Secara struktur Organisasi, LAZ Harfa dipimpin oleh direktur Perempuan. Hal tersebut mencerminkan bagaimana perempuan dilibatkan dalam hal strategis, tidak hanya dalam tataran teknis. Perempuan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan.

“bukan hanya ditataran aplikasi di lapangan, kami sudah membuat aturan di tingkat yayasan dari tingkat pelaku hingga pengambil keputusan. termasuk di sisi struktural. bahkan di level direktur utama kami adalah perempuan, dan di kantor cabang kami juga dipimpin oleh perempuan”

Struktur organisasi LAZ harfa dapat dilihat pada gambar di bawah ini, dimana secara pengurus operasional LAZ Harfa dipimpin oleh Direktur Utama dari kaum perempuan, yaitu Indah Prihanande, SE.



Gambar 4.2 Struktur Organisasi LAZ Harfa



#### 4.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Lingkungan

Dalam 17 tujuan pembangunan berkelanjutan, LAZ Harfa sendiri sudah banyak berkecimpung di dalamnya melalui berbagai macam program. Hal tersebut terlihat dari laporan program yang sudah dilaksanakan selama tahun 2021. Adapun program-program tersebut dikategorikan ke dalam dua bentuk, yakni program jangka pendek dan program jangka panjang. Dalam program jangka pendek yang terdapat di LAZ Harfa bersifat kondisional. Dikatakan kondisional dikarenakan programnya tidak direncanakan sebelumnya dan tidak diagendakan waktunya. Meskipun begitu, program tersebut tentunya menjadi program yang wajib dilaksanakan, seperti tanggap bencana alam. Dalam tanggap bencana alam, LAZ Harfa selalu hadir memberikan bantuan baik bantuan secara moril maupun materil.

Adapun mengenai program jangka panjang yang terdapat di LAZ Harfa ialah Program Desa Harapan. Desa Harapan merupakan program pembangunan dan pemberdayaan desa melalui pendampingan masyarakat secara intensif guna mendorong perubahan yang bersumber dari kesadaran masyarakat yang banyak memfokuskan pada 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Proses pendampingan yang dilakukan didasarkan pada partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, teknik yang dilakukan oleh LAZ Harfa menggunakan pendekatan pemberdayaan *Asset Based Community Development* (ABCD).

Pendekatan ABCD dikatakan lebih tepat jika diterapkan kepada masyarakat desa, dengan alasan bahwa pedesaan sendiri merupakan lokasi yang sangat kaya akan sumber daya alam. Selain itu, pelibatan aktif masyarakat menjadi kunci dalam kegiatan pemberdayaan yang dilakukan olehnya, karena partisipasi masyarakat membawa paradigma bahwa masyarakat menjadi subjek dari pembangunan itu sendiri, dan tidak lagi menjadi objek. Ketika penerima manfaat menjadi subjek, tentunya mereka akan menjadi agen dari pembangunan perubahan di desa tersebut, meskipun fasilitator/lembaga sudah tidak melaksanakan program di lokasi tersebut.

Dalam Program Desa Harapan, terdapat beberapa kegiatan pemberdayaan yang tentunya melibatkan peran aktif dari masyarakat selaku penerima manfaat. Beberapa program yang diterima di antaranya:

#### A. Kelompok Keuangan Mikro (KKM)

KKM merupakan program dana bergulir yang diberikan kepada masyarakat dhuafa untuk mengembangkan usahanya dan membentuk kemandirian warganya. Melalui program ini diharapkan dapat menggerakkan roda perekonomian di desa. Program KKM ini berbentuk pendampingan dan peminjaman uang yang bisa digunakan anggotanya untuk modal usaha. Dalam

setiap kelompok terdiri dari 10 orang di setiap desa dampungannya. Jumlah pinjaman yang diberikan bervariasi, tergantung usaha yang dijalankan oleh setiap anggota kelompok di desa dampungannya tersebut.

Hal yang menjadi tujuan utama dari program ini yakni untuk membantu masyarakat dalam membuat usaha, dengan harapan agar tercipta stabilitas ekonomi dalam keluarga. Ini tentunya sangat membantu, karena dalam pinjaman yang diberikan tidak dibebankan bunga sama sekali. Dengan perkataan lain, masyarakat hanya perlu mengembalikan pinjaman sesuai dengan jumlah pinjaman yang diberikan, dalam pengembalian uang pinjaman, jumlah yang harus dikembalikan.



Gambar 4.3 Kelompok Keuangan Mikro

Gambar di atas memperlihatkan kepada kita bahwa perempuan lebih banyak terlibat dalam pemberdayaan, karena selama ini mereka lebih banyak tinggal di rumah dan melakukan kegiatan domestik dan hanya bergantung kepada penghasilan suami. Kehadiran LAZ Harfa memberikan para perempuan ini untuk dapat berkontribusi untuk kelangsungan keluarga, yaitu melalui program kelompok keuangan mikro. Program ini tidak hanya memberikan modal secara cuma-cuma, melainkan modal tersebut merupakan pinjaman yang harus dikembalikan tanpa bunga.

Tidak hanya diberikan pinjaman modal, para perempuan ini diberikan keahlian melalui bantuan peningkatan kompetensi untuk menjalankan usaha yang didasarkan pada sumber daya alam yang tersedia. Oleh karena itu, para perempuan ini memiliki rasa tanggung jawab untuk mengembalikan uang melalui kegiatan usaha yang mereka tekuni. Dengan perkataan lain, mereka tidak diberikan pinjaman lalu berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut saja, tetapi terdapat proses pemberdayaan yang menjadikan perempuan tersebut dapat berdaya dan mandiri sehingga mampu mengembalikan pinjaman modal melalui hasil usahanya sendiri.

#### B. CLTS (*Community Led Total Sanitation*)

Di beberapa daerah di Provinsi Banten sendiri, kegiatan buang air besar sembarangan cukup banyak ditemui. Tentunya hal tersebut menjadi tugas bersama, karena hal itu berkaitan erat dengan kesehatan. Oleh karena itu, LAZ Harfa turut mengambil peran dalam penyelesaian masalah tersebut melalui program *Community Led Total Sanitation* (CLTS). Ini merupakan program kesehatan yang bertujuan untuk membantu masyarakat berperilaku pola hidup sehat dengan

tidak melakukan buang air besar sembarangan. Melalui pendekatan arisan jamban, masyarakat diajak untuk membangun jamban secara mandiri. Ada 4 prinsip arisan jamban:

- 1) Tanpa subsidi kepada masyarakat.
- 2) Tidak menggurui, tidak memaksa, tidak mempromosikan jamban.
- 3) Masyarakat sebagai pemimpin.
- 4) Masyarakat terlibat secara total dalam melakukan analisis permasalahan hingga pelaksanaan dan pemeliharaan. Terdapat banyak sekali program yang sedang berjalan saat ini, contohnya salah satu dari bagian program Desa Harapan, yaitu program CLTS (Community Led Total Sanitation).



Gambar 4.4 Arisan Jamban

Gambar 4.4 memperlihatkan beberapa orang sedang membuat tangki kotoran. Tangki kotoran ini merupakan salah satu bagian dari program LAZ Harfa mengenai arisan jamban. Kehadiran program ini merupakan bentuk keprihatinan LAZ Harfa terhadap perilaku tidak sehat yang dilakukan oleh masyarakat, yakni melakukan buang air besar sembarangan. Hal menarik dari program ini adalah prinsip-prinsip yang diterapkan dalam pembuatan jamban, yang secara penuh mengajak partisipasi penuh dari masyarakat. Kehadiran masyarakat hanya menjadi fasilitator dan agen perubahan yang

mengajak masyarakat agar dapat sadar dan mau berubah menjadi lebih baik.

### C. Pembangunan Sarana Air Bersih (SAB)

Program pembangunan Sarana Air Bersih (SAB) melibatkan partisipasi masyarakat melalui pendekatan CLTS, yaitu pendekatan yang diterapkan untuk memfasilitasi masyarakat dalam memahami permasalahan dan potensi peningkatan sanitasi di Indonesia. Pembangunan sarana SAB oleh LAZ Harfa bertujuan untuk membantu beberapa desa yang masih tertinggal dalam kondisi kesehatannya. Masyarakat yang masih belum memiliki SAB biasanya diberikan pendampingan dan pemberian sarana yang dibutuhkan dalam pembuatan SAB tersebut.

Dalam pelaksanaan pembuatan SAB ini LAZ Harfa bekerjasama dengan berbagai pihak, salah satunya YBM PLN. YBM PLN berperan penting dalam pendistribusian dana dari infak, zakat, dan sedekah, sedangkan LAZ Harfa berperan penting dalam fasilitator program. Melalui sinergi tersebut, program ini mampu memberdayakan masyarakat baik itu dari segi ekonomi maupun segi kesehatan.





Gambar 4.5. Sarana Air Bersih

Gambar di atas merupakan lokasi program sarana air bersih yang dibuat oleh LAZ Harfa yang bekerjasama dengan YBM PLN. Program sarana air bersih ini tidak 100% hibah secara langsung dari lembaga untuk masyarakat. Di dalam program ini, masyarakat diberdayakan secara maksimal agar memiliki rasa tanggung jawab atas bantuan yang diberikan. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat diberikan edukasi terlebih dahulu mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Dikatakan bahwa, apa yang saat ini dilakukan terhadap lingkungan melalui pengelolaan sumberdaya alam, akan memiliki dampak di kemudian hari.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Mamak Jamaksari

Apa yang disampaikan oleh Mamak dalam wawancaranya merupakan prinsip pemberdayaan yang ekologis dan sesuai dengan SDGs. Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan saat ini akan berdampak di kemudian hari. Adapun dampaknya bisa menjadi positif atau bahkan negatif. Berdampak positif jika mengelola lingkungan dan sumberdaya alam secara bijak maka alam akan memberikan timbal balik melalui kebaikan alam itu sendiri, misalkan tersedianya air tanah yang memadai.

Dengan menggunakan air secara bijak dan menjaga kelestarian hutan atau pengurangan penebangan pohon, maka ketersediaan air akan terjaga dan dapat dirasakan oleh generasi mendatang. Berbeda jika melakukan pemborosan terhadap penggunaan air, dan bahkan tidak mementingkan keberadaan tanaman hijau di sekitar, maka krisis air merupakan hal yang nyata. Oleh karena itu, LAZ Harfa sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat tidak hanya memberikan hibah cuma-cuma, perlu penyadaran kepada masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan dan mengelola sumber daya alam dengan bijak dan tidak melakukan eksploitasi secara gila-gilaan.

Dengan perkataan lain, LAZ Harfa memiliki semangat ekofeminis karena mencoba memberikan pemahaman ekofeminisme kepada masyarakat melalui pelaksanaan program. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang keadilan dan hak yang dimiliki oleh setiap makhluk, tidak terbatas kepada manusia semata.

#### D. Promosi Kesehatan

Kesehatan merupakan kebutuhan utama bagi manusia dalam menjalani aktivitas sehari-hari, namun masih terdapat beberapa masyarakat yang masih acuh akan pentingnya kesehatan. Selain itu, hanya segelintir masyarakat yang dapat menjangkau fasilitas kesehatan. Fakta di lapangan masih banyak masyarakat yang dapat tidak dapat menjangkau hal tersebut, bahkan sulit untuk mendapatkan layanan kesehatan. Oleh karena itu, promosi kesehatan kepada masyarakat menjadi hal penting, baik sebagai mitigasi ataupun pelayanan kesehatan secara langsung.

Promosi kesehatan yang dilaksanakan oleh LAZ Harfa berupa kegiatan edukasi kepada masyarakat untuk hidup sehat dan memberikan informasi dengan harapan dapat memicu kesadaran masyarakat akan pentingnya melakukan pola hidup

bersih dan sehat. Adapun fokus promosi kesehatan ini dilakukan kepada masyarakat yang mengalami keterbatasan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, dimulai dari edukasi kesehatan, penyediaan sarana prasarana pendukung kesehatan masyarakat hingga bantuan kesehatan secara langsung.

Terdapat beberapa bentuk promosi kesehatan yang sudah diberikan di antaranya pendampingan kesehatan, khitanan, klinik harfa medika, bantuan kursi roda, pembangunan SAB dan MCK, penanganan dan pencegahan Covid-19. Pelaksanaan promosi kesehatan ini tidak bersifat insidental dan fokus pada desa tertentu, tetapi dilakukan secara menyeluruh, seperti halnya penanganan dan pencegahan Covid-19.

Berdasarkan gambar 4.6 di bawah ini terlihat juga bahwa perempuan menjadi bagian yang banyak terlibat banyak terlibat dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh LAZ Harfa dibandingkan laki-laki. Selain itu, fasilitator yang terlibat dalam kegiatan ini adalah perempuan dan juga narasumber dalam kegiatan ini adalah bidan yang tentunya berjenis kelamin perempuan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Mamak Jamaksari

Gambar 4.6 Promosi Kesehatan



#### E. Pemanfaatan Lahan Pekarangan (PLP)

Beberapa masyarakat belum menyadari bahwa pekarangan rumah bisa menjadi alternatif dalam meningkatkan perekonomian keluarga. Di rumah-rumah pedesaan, biasanya rumah-rumah masyarakat memiliki pekarangan yang cukup luas dan bisa dimanfaatkan sebagai tempat untuk bercocok tanam. Berdasarkan hal tersebut, LAZ Harfa menjadikan potensi tersebut menjadi program pemberdayaan masyarakat yang dinamakan Pemanfaatan Lahan Pekarangan (PLP).

Kegiatan yang sangat memberikan pengaruh positif dan melibatkan semua elemen masyarakat khususnya perempuan. Para ibu rumah tangga dilibatkan secara aktif sebagai wujud kemandirian pangan keluarga. Dengan melakukan penanaman berbagai macam tanaman buah dan sayur, masyarakat mampu mendapatkan manfaat yang banyak. Selain terjadi ketahanan pangan di lingkungan keluarga, masyarakat pun dapat menjual hasilnya sehingga mereka dapat terbantu secara ekonomi.

Dalam program ini, LAZ Harfa hanya berperan sebagai fasilitator dengan cara memberikan pendampingan kepada masyarakat dan sosialisasi tentang pemanfaatan lahan pekarangan yang dimiliki masyarakat. Harapan besar program ini ialah tercipta ketahanan pangan dan kemandirian keluarga dalam sisi ekonomi, sehingga dapat menjadi individu yang mandiri, tidak boros/konsumtif.



Gambar 4.7 Pemanfaatan Lahan pekarangan

Berdasarkan informasi yang disampaikan, terlihat bahwa kehadiran LAZ Harfa ingin memberikan perubahan positif bagi seluruh elemen masyarakat, khususnya kepada perempuan. Memberikan edukasi kepada perempuan dengan harapan perempuan menjadi lebih terbuka pikirannya agar dapat mandiri dan memiliki pengetahuan yang lebih terhadap pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam. Hal itu tentunya menggambarkan LAZ Harfa secara berkelanjutan mendorong perempuan agar memiliki

sensitivitas terhadap lingkungan dan sumber daya alam.

Dengan perkataan lain, proses pemberdayaan yang dilaksanakan telah memandirikan perempuan sehingga mampu dan dapat memiliki hak yang sama untuk dapat mengelola lingkungan dan sumber daya alam. Selain itu, proses pemberdayaan yang dilakukan perempuan tidak berdampak bagi perempuannya saja, lebih dari itu ekonomi keluarga terbantu sehingga tujuan-tujuan SDGs lainnya tercapai secara perlahan melalui tujuan kesetaraan gender. Maksud dari pemberdayaan dengan melakukan pelibatan aktif perempuan adalah memberikan keleluasaan atau wewenang untuk dapat menentukan arah/program yang sesuai dengan kehendak penerima manfaat, yang didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman mereka. Pemberdaya masyarakat hanya berperan sebagai fasilitator yang memberikan fasilitasi agar tujuan program tercapai.

#### F. Pemberdayaan Difabel

Difabel menjadi sasaran program yang utama bagi LAZ Harfa agar memberikan program-program yang inklusif. Sebagaimana tujuan pembangunan berkelanjutan yang berusaha untuk menghapuskan ketimpangan. Jenis pendampingan yang diberikan



kepada difabel berupa pemberian modal usaha, pemberian alat bantu gerak seperti kursi roda atau kaki palsu, pembinaan agama, dan beasiswa pendidikan.

Program pemberdayaan memberikan ruang kepada difabel untuk berkembang dan memunculkan kepercayaan dirinya sendiri. Selain itu, para difabel diajak untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya melalui pendampingan yang diberikan. Pemberdayaan difabel ini dinilai sangat efektif, hal tersebut terlihat dari banyaknya kemajuan dari difabel yang dilakukan pendampingan terhadapnya. Munculnya kepercayaan diri dan juga hilangnya rasa malu terhadap orang lain karena keterbatasan atau kekurangan yang dimiliki olehnya.



Gambar 4.8 Pemberdayaan Difabel

Pendampingan dengan memberikan konseling agar muncul rasa percaya diri dari difabel dapat dikatakan hal yang kompleks. Terlebih jika difabel tersebut sudah dewasa, tentunya rasa malu karena merasa berbeda dari yang lain sudah menumpuk di dalam dirinya. Oleh karena itu, LAZ Harfa merasa perlu untuk memberikan hak yang sama terhadap mereka yang difabel, sehingga

ketimpangan tertanggulangi dengan harapan keadilan dapat merata.

Apa yang dilakukan LAZ Harfa dengan tujuan memberikan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa melihat latar belakang etnis, warna kulit, jenis kelamin, dan keadaan fisik dapat dikatakan serupa dengan yang diperjuangkan oleh para feminis. Terlebih proses pemberdayaan tersebut memberikan kepercayaan diri kepada difabel agar mau tampil di publik dan melakukan pengelolaan lingkungan dan sumber daya di daerah tempat tinggalnya. Berdasarkan hal-hal disampaikan dapat diasumsikan program ini merupakan salah satu gerakan ekofeminis yang dilakukan oleh LAZ Harfa, meskipun mereka tidak sadar bahwa yang dilakukan telah memberikan sumbangan dalam gerakan ekofeminis.

#### G. Sosialisasi Gender dan Perlindungan Anak

Sosialisasi Gender dan Perlindungan Anak merupakan program yang menginduk dari beberapa program lainnya. Dengan perkataan lain, setiap program yang dilaksanakan oleh LAZ Harfa selalu melibatkan perempuan. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pendampingan kepada masyarakat mengenai pentingnya peran

perempuan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Selain itu, program ini dimaksudkan juga untuk memberikan ruang kepada perempuan dan terus mengajak masyarakat untuk mengambil peran dalam menyukseskan kesetaraan gender, berpartisipasi aktif dan turut terlibat di dalamnya.

Selain itu, sosialisasi perlindungan anak juga dilakukan sebagai wujud dalam melindungi anak-anak dari kekerasan di dalam atau di luar rumah tangga. Dengan perkataan lain, program sosialisasi gender dan perlindungan anak bukanlah program yang berjalan sendiri, melainkan selalu menempel dan diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat selaku penerima manfaat. Hal tersebut tentunya menguatkan masyarakat agar lebih responsif terhadap gender dan perlindungan anak, berbeda jika hanya menjadi satu program yang sifatnya insidental.

Berdasarkan paparan-paparan di atas, terlihat jelas program mengenai desa harapan yang ternyata banyak melibatkan perempuan, baik sebagai fasilitator maupun para penerima manfaat programnya. Selain itu, sosialisasi gender dan perlindungan bukan merupakan program yang berdiri sendiri, melainkan kegiatan yang selalu disampaikan di setiap program yang dilaksanakan. Hal itu secara langsung

memberikan penyadaran yang berkelanjutan mengenai pentingnya keterlibatan aktif perempuan dalam melakukan perubahan.

Di luar program desa harapan, masih banyak program yang dilakukan oleh LAZ Harfa. Adapun kegiatan atau program yang dilaksanakan tetap memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan agar banyak memberikan kontribusi melalui pengetahuan dan pengalamannya untuk mensukseskan programnya. Adapun beberapa program tersebut di antaranya *Pelatihan Pengelolaan Sampah Organik dan Anorganik, Pelatihan Pengelolaan Bahan Makanan Lokal yang Sehat dan Bergizi Seimbang, Pelatihan Pengelolaan dan Inovasi Produk Lokal, Pembentukan Kelompok Perlindungan Anak di Masyarakat, Penghijauan Lahan Pekarangan.*

Dalam pelatihan pengelolaan sampah organik, LAZ Harfa banyak melibatkan partisipasi aktif dari perempuan. Secara jelas program ini dapat dikategorikan ke dalam gerakan ekofeminis. Hal tersebut didasarkan pada keterlibatan perempuan dalam mengelola lingkungan melalui pengolahan limbah. Perempuan diberikan edukasi terkait dampak negatif jika limbah dibiarkan menumpuk, sehingga perlu diberikan pelatihan mengenai pengolahan limbah.<sup>5</sup> Sebab, perempuan banyak melaksanakan kegiatan di lingkungan rumah, sehingga paling mengerti keadaan lingkungan dan menjadi orang pertama yang akan

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Mamak Jamaksari

terdampak baik secara fisik maupun psikologis atas pemberian penumpukan limbah rumah tangga.

Oleh karena pelestarian lingkungan dan sumber daya lebih diketahui oleh perempuan, maka peran perempuan menjadi unsur yang cukup vital. Pengetahuan dan pengalaman perempuan menjadi aset penting untuk dapat diketahui sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pemberdayaan. Peran dan keterlibatan perempuan penuh dalam pelatihan pengelolaan limbah organik dan anorganik yang dilaksanakan oleh LAZ Harfa dapat dilihat pada gambar 4.9.a dan gambar 4.9.b di bawah ini,



Gambar 4.9.a Pelatihan Pengelolaan Sampah Organik dan Anorganik Kering





Gambar 4.10.a Pelatihan Pengelolaan Bahan Makanan Lokal yang Sehat dan Bergizi Seimbang





Gambar 4.10.b Pelatihan Pengelolaan Bahan Makanan Lokal yang Sehat dan Bergizi Seimbang

Dalam pelatihan ini dapat dikatakan bahwa pengetahuan dan pengalaman perempuan khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya lokal menjadi aset penting untuk ditampilkan di publik. Selain itu, program ini secara tidak langsung memberikan edukasi kepada perempuan untuk dapat memperjuangkan kelestarian lingkungan dan alam. Sebab, ketika terjaganya kelestarian lingkungan dan alam, maka lingkungan dan alam sendiri akan memberikan dampak positif bagi mereka dan juga generasi mendatang. Oleh karena itu dapat diasumsikan bahwa program ini pun menjadi salah satu

indikator LAZ Harfa turut memperjuangkan gerakan ekofeminisme.

Program pengelolaan bahan makanan lokal yang sehat dan bergizi seimbang tidak jauh berbeda dengan program selanjutnya, yakni pelatihan pengelolaan dan inovasi produk lokal. Proses pengelolaan dan inovasi produk lokal menjadi program yang memberikan dampak positif untuk meningkatkan pendapatan perempuan di suatu daerah melalui pengelolaan produk lokal.<sup>6</sup> Pengelolaan dan inovasi produk lokal tersebut tentunya tidak serta merta mengeksploitasi sumber daya alam secara gegabah melainkan mempertimbangkan keberlangsungan alam itu sendiri, sehingga pemanfaatannya dilakukan secara bijak.

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Mamak Jamaksari



Gambar 4.11.a Pelatihan Pengelolaan dan Inovasi Produk Lokal



Gambar 4.11.b Pelatihan Pengelolaan dan Inovasi Produk Lokal

Di samping program yang memberdayakan perempuan melalui pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam, terdapat program yang sifatnya murni melestarikan lingkungan, yakni penghijauan lahan pekarangan. Program ini dimaksudkan agar masyarakat memiliki perhatian dan atau sensitivitas terhadap keberlangsungan alam.<sup>7</sup> Di bawah ini merupakan gambar pekarangan yang diberikan penghijauan melalui penanaman tumbuhan-tumbuhan hias.

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Mamak Jamaksari



Gambar 4.12. Penghijauan Lahan Pekarangan atau Lahan Kosong

Selain itu, sebagai komitmen memberantas ketimpangan dan ketidakadilan, baik terhadap perempuan maupun anak, LAZ Harfa membangun kelompok masyarakat dengan membentuk kelompok perlindungan anak di masyarakat. Jika dianalisa lebih jauh, perlindungan anak di masyarakat tidak hanya berkaitan dengan perlindungan secara fisik pada saat itu, melainkan keberlangsungan hidup mereka di masa mendatang. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab bersama bagi seluruh pihak untuk dapat melestarikan atau menjaga keberlangsungan lingkungan dan alam. Sebab, anak-anak saat ini yang menjadi generasi selanjutnya memiliki hak yang sama agar dapat menikmati alam sebagaimana yang dinikmati oleh masyarakat sekarang di masa depan nanti.

Berdasarkan pembahasan-pembahasan di atas, sebagai program unggulan LAZ Harfa, dapat diasumsikan bahwa program desa harapan telah memberikan kontribusi untuk mengurangi ketimpangan gender dan memberikan edukasi terhadap pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam dengan bijak. Dengan perkataan lain, LAZ Harfa telah berkontribusi terhadap gerakan ekofeminis dengan cara memperjuangkan peran perempuan melalui pelibatan aktif perempuan dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam dengan mengangkat pengetahuan dan pengalaman perempuan.

### **4.3. Banten: Perempuan dan Lingkungan**

Bagian ini membicarakan pengalaman perempuan pekerja sosial dan penerima manfaat dari program-program yang dilaksanakan oleh LAZ Harfa. Pengalaman ini mereka sampaikan sendiri melalui tulisan, yang secara metodologi disebut sebagai otobiografi. Hal ini dimaksudkan agar mereka memiliki keleluasaan dalam bercerita, tanpa merasa ada intervensi dari peneliti.

#### **4.3.1 Banten dan Perempuan**

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten, diketahui bahwa wilayah administratifnya meliputi Kabupaten Serang, Kabupaten

Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Cilegon. Dalam 4 kabupaten dan 2 kota tersebut, berdasarkan data laporan BPS (Banten dalam Angka Tahun 2022) diketahui bahwa terdapat 779 Desa Swadaya, 297 Desa Swakarya, dan 391 Desa Swasembada, dengan jumlah laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Laki-laki berjumlah 4.078.788 jiwa, sedangkan perempuan berjumlah 4.019.489 jiwa.<sup>8</sup>

Seiring berjalannya waktu, beberapa kabupaten/kota melakukan pemekaran, sehingga dalam tahun 2022 diketahui bahwa Provinsi Banten terdiri dari 4 kabupaten dan 4 kota. Berdasarkan data BPS tahun 2022, pada tahun 2021 jumlah laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan, yakni laki-laki 6.147.144 jiwa, sedangkan perempuan 5.914.311.<sup>9</sup> Selain itu, angka tenaga kerja perempuan lebih sedikit dibandingkan laki-laki, perbedaan tersebut sebesar 50%, yakni 4.002.964 laki-laki dan 2.257.690 perempuan (BPS Provinsi Banten, 2022: 90).

Berdasarkan data BPS yang telah dipaparkan, di Provinsi Banten masih terlihat kesenjangan yang cukup signifikan antara laki-laki dan perempuan dalam dunia kerja. Ditunjukkan bahwa tenaga kerja laki-laki masih mendominasi dibandingkan dengan tenaga kerja perempuan. Padahal salah satu dampak positif dari

---

<sup>8</sup> Badan Pusat Statistik: Banten dalam Angka Tahun 2000

<sup>9</sup> Badan Pusat Statistik: Provinsi Banten dalam Angka Tahun 2021

pemekaran wilayah yaitu bertambahnya lapangan kerja, sehingga perempuan memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan sebagaimana laki-laki. Hal tersebut tentunya dilatarbelakangi oleh banyak hal, baik itu regulasi dari pemerintah daerah, perusahaan swasta, ataupun konstruksi sosial budaya.

Sebagai pemegang regulasi atau kebijakan, dengan adanya otonomi daerah tentunya pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh untuk dapat membuat kebijakan yang memberikan banyak kesempatan bagi perempuan untuk dapat terlibat di dunia kerja, atau bahkan memberikan kesempatan bagi perempuan untuk turut mengambil kebijakan yang dapat turut berpihak pada pekerja perempuan.

Begitu pun perusahaan swasta ataupun lembaga sosial (NGO), sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan tentunya memiliki peranan penting untuk membuka lapangan kerja yang berpihak kepada perempuan. Melalui peraturan perusahaannya tentunya mampu memberikan ruang bagi perempuan untuk dapat turut terlibat dalam pembangunan. Selain itu, konstruksi budaya dirasa memiliki pengaruh besar atas kehadiran perempuan di dunia kerja khususnya dan ranah publik umumnya. Oleh karena itu, sosialisasi kesetaraan gender merupakan hal yang penting untuk didapatkan oleh setiap unsur baik itu pemerintah ataupun swasta. Ketika isu kesetaraan gender



dapat dipahami oleh seluruh unsur, maka optimisme terciptanya kesetaraan gender merupakan keniscayaan. Terlebih berkaitan dengan kehadiran pengetahuan dan pengalaman perempuan dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam.

#### 4.3.2 Perempuan dan Lingkungan

Ketika diperankan untuk banyak berkegiatan di ranah domestik, maka dapat diasumsikan perempuan sangat dekat dengan alam. Sebab, ketika mereka bergulat dengan kegiatan domestik, tentunya sifat dan perilaku lingkungan dan alam lebih banyak dipahami oleh perempuan dibandingkan laki-laki. Baik itu dalam pengelolaan air di rumah, kebutuhan biologis mendasar yakni makanan, dan juga keadaan lahan di lingkungan sekitar rumah dan juga berhubungan dengan sifat dan kekhasan lingkungan alam di tempat tersebut.

Oleh karena itu, melihat peran perempuan yang mengelola lingkungan dan sumber daya alam menjadi hal menarik untuk diangkat. Dalam hal ini, melihat peran perempuan pekerja sosial sebagai fasilitator yang mengajak perempuan lainnya untuk melakukan perubahan, dan juga perempuan penerima manfaat dari kegiatan lembaga sosial, yakni program yang dilaksanakan oleh LAZ Harfa. Sebagaimana yang disampaikan sebelumnya, pengetahuan dan pengalaman mereka merupakan hal yang penting untuk diketahui dan diangkat ke publik. Maka bagian ini

menampilkan bagaimana pengetahuan dan pengalaman mereka dalam mengelola lingkungan dan sumber daya alam. Melalui otobiografi ini akan terlihat bagaimana pengetahuan dan pengalaman perempuan ditampilkan secara natural, yang tentunya hal itu menjadi bagian yang sangat menarik untuk diketahui.

Apabila dilihat secara sekilas, terdapat hal menarik dari LAZ Harfa sebagai lembaga sosial (NGO) yang dapat dikatakan cukup besar - dilihat dari program-programnya - yaitu direkturnya seorang perempuan. Selain itu, diketahui bahwa dalam kebijakannya mengenai pegawai, LAZ Harfa lebih banyak melakukan rekrutmen pekerja sosial dengan jenis kelamin perempuan dibandingkan laki-laki, dengan persentase 60% perempuan dan 40% laki-laki.<sup>10</sup> Berdasarkan hal itu, terlihat bahwa LAZ Harfa responsif terhadap gender.

Otobiografi ini menampilkan tulisan dari Novita Melani. Ia merupakan fasilitator senior yang sudah cukup lama melakukan kegiatan pendampingan pemberdayaan di masyarakat yang berada di pelosok Provinsi Banten. Menjadi perempuan pekerja sosial bukanlah sesuatu yang mudah, apalagi di LAZ Harfa. Program yang dilaksanakan tidak berupa pemberian hibah bangunan fisik ataupun kebutuhan dasar dari masyarakat. LAZ Harfa sendiri

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Mamak Jamaksari selaku Direktur Program, pada Jumat 26 Agustus 2022, pukul 15.00 WIB

memfokuskan kegiatan programnya terhadap penyuksesan SDGs.

Lebih jauh lagi, program yang dilaksanakan mengutamakan penyadaran kepada masyarakat lalu diteruskan ke dalam kegiatan pemberdayaan untuk dapat merubah keadaan mereka ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, kegiatan pendampingan dan pemberdayaan yang dilaksanakan memerlukan waktu yang cukup panjang. Tidak cukup satu atau dua bulan, melainkan perlu proses panjang berbulan-bulan hidup dan tinggal berdampingan bersama mereka sebagai pendekatan yang selanjutnya melaksanakan program pemberdayaan.

Menjadi pekerja sosial merupakan pilihan bagi Novita Melani, ia mengungkapkan alasannya untuk memilih pekerjaannya saat ini, dikatakan bahwa,

“menjadi peksos (pekerja sosial) adalah suatu hal yang saya inginkan, saya ingin diri saya bisa membantu dan bermanfaat untuk orang lain”<sup>11</sup>

Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa sebagai seorang perempuan, ia merasa memiliki tanggung jawab untuk dapat membantu orang lain (perempuan) yang berada di pelosok banten. Rasa tanggung jawab tersebut ia salurkan dengan

---

<sup>11</sup> Otobiografi Novita Melani

cara menjadi pekerja sosial, melalui keterlibatannya di kegiatan sosial di sebuah lembaga sosial, harapan dan mimpinya terasa lebih cepat tercapai dibandingkan bergerak secara individu. Selain itu, diungkapkan bahwa melalui lembaga ia bisa mendapatkan banyak ilmu dan wawasan baru terkait pemberdayaan masyarakat yang banyak melibatkan perempuan dan juga mengenai pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam. Hal tersebut dikarenakan metode yang digunakan dalam kegiatan pemberdayaan yakni ABCD (*Asset Based Community Development*) atau bisa diistilahkan dengan pemberdayaan masyarakat berdasarkan sumber daya.

Sumber daya yang dimaksud dalam metode ABCD bukan hanya berkaitan dengan sumber daya alam semata, melainkan sumber daya manusia pun merupakan bagian penting di dalamnya. Berdasarkan informasi hasil wawancara pun dikatakan bahwa, di berbagai desa tempat program pemberdayaan berjalan, lebih banyak perempuan yang terlibat dibandingkan laki-laki. Hal tersebut dikarenakan laki-laki lebih banyak bekerja di luar daerah tempat tinggalnya. Oleh karena itu, perempuan dikatakan lebih dekat dengan lingkungan dan sumber daya alam di suatu daerah dibandingkan laki-laki.

Selain itu, diketahui juga bahwa pengetahuan dan pengalaman perempuan mampu menjadi inspirasi dan

masukannya positif bagi perempuan lainnya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Novita Melani,

“rasanya tuh kalau kita melakukan pemberdayaan perempuan seperti belajar untuk diri sendiri, dan ketika kita mengedukasi masyarakat dan masyarakat mau berubah itu senang bukan main. Itu tandanya kita berhasil mengedukasi masyarakat dan akhirnya masyarakat berubah.

Biasanya kami yang perempuan lebih dekat kepada ibu-ibu dan yang laki-laki lebih dekat dan mudah berbicara dengan para bapak<sup>2</sup>”<sup>12</sup>

Dalam kutipan tersebut terlihat bahwa melalui kegiatan pemberdayaan yang dilakukan terhadap perempuan lainnya, ternyata memiliki dampak positif bagi fasilitator pelaku pemberdayaan. Ditunjukkan bahwa ketika melakukan pemberdayaan kepada perempuan lainnya, hal itu seperti memberikan pelajaran bagi dirinya sendiri, baik dalam proses pemberdayaan maupun pengetahuan dan pengalaman yang didapatkan dari penerima manfaat pemberdayaan.

Selain itu, ditunjukkan bahwa muncul perasaan luar biasa ketika mampu memberikan dampak positif bagi perempuan lainnya melalui program yang dilaksanakan. Hal tersebut tentunya memperlihatkan bahwa perempuan melalui

---

<sup>12</sup> Otobiografi Novita Melani

pengetahuan dan pengalamannya mampu memberikan perubahan kepada masyarakat secara luas, khususnya kepada perempuan. Tidak ada batasan terhadap jenis kelamin tertentu untuk dapat membuat perubahan. Perjuangan sebagai perempuan yang ingin memberikan perubahan bagi masyarakat terhadap lingkungan melalui penyadaran secara berkelanjutan ini dapat dikatakan sebagai sebuah gerakan ekofeminis.

Dalam tulisannya, terlihat bahwa perubahan yang terjadi di masyarakat menjadi pemicu semangat fasilitator untuk terus melakukan kerja-kerja sosial memberikan kontribusi positif bagi masyarakat lainnya. Secara tidak langsung, ditampilkan bahwa pengetahuan dan pengalaman perempuan di lapangan memberikan wawasan penting bagi fasilitator dan lembaga untuk dapat melakukan peningkatan-peningkatan dan modifikasi untuk perubahan di daerah lainnya agar program yang direncanakan tercapai dengan hasil yang memuaskan. Adapun keberhasilan tersebut diukur berdasarkan perubahan pola pikir, sikap, dan perilaku masyarakat mengenai lingkungan dan sumber daya alamnya.

Selain itu, Novita Melani bercerita mengenai tugas pertama ketika menjadi pekerja sosial. Ia mengungkapkan bahwa pertama kali bertugas langsung dikirimkan ke lokasi kebencanaan tsunami di Selat Sunda. Sebagai fasilitator perempuan tentunya ada perasaan tersendiri dibandingkan

fasilitator laki-laki. Menjadi perempuan dan pertama kali melakukan kegiatan sosial ke daerah bencana perlu mempersiapkan banyak hal yang berkaitan dengan kebutuhan biologisnya, terlebih akan bertemu orang-orang baru yang belum pernah kenal dan bahkan dalam keadaan psikologis tidak baik karena bencana.<sup>13</sup>

Menurutnya untuk dapat menetap sehari-hari merupakan tantangan tersendiri baginya. Akan tetapi, semangat menjalankan misi sosial menjadi faktor yang memberikan semangat atas apa yang akan dan sedang dikerjakan. Melihat perempuan dan anak-anak yang terdampak bencana merupakan salah satu faktor yang menjadikannya tetap bertahan di lapangan. Sebab, pendekatan perempuan, lansia, dan anak-anak dirasakan lebih mudah untuk dilakukan oleh sesama perempuan, karena dirasa memiliki kesamaan dalam pengetahuan dan pengalaman.<sup>14</sup> Oleh karena itu, fasilitator perempuan menjadi bagian penting dalam mensukseskan proses pemberdayaan seluruh aspek masyarakat dapat menikmati hasil dari pemberdayaan.

Lebih jauh lagi dalam SDGs, dengan slogan *Leave No One Behind* atau dalam Bahasa Indonesia diartikan dengan ‘tidak ada yang tertinggal’, tentunya seluruh aspek dapat menikmati hasil dari pembangunan, baik seluruh

---

<sup>13</sup> Otobiografi Novita Melani

<sup>14</sup> *Ibid.*

lapisan masyarakat maupun keberlangsungan lingkungan alam. Artinya perempuan memiliki peranan penting dalam pembangunan, yang mana dapat menjangkau hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh laki-laki. Melalui pengetahuan dan pengalamannya, ada hal-hal yang tidak diketahui dan dialami oleh laki-laki, sehingga dapat program pembangunan bisa tepat sasaran karena tidak didasarkan pada sudut pandang laki-laki semata.

Selain itu, dalam pelaksanaan program, Novita Melani merasa perlu mengeluarkan energi ekstra, karena program yang dilaksanakan oleh LAZ Harfa tidak berbentuk pemberian/hibah bantuan, melainkan program yang sifatnya pemberdayaan dengan tujuan utama untuk merubah pola pikir masyarakat agar mampu berdaya tanpa ketergantungan terhadap pemberian pemerintah maupun swasta, meskipun programnya merupakan proses pemulihan pasca-bencana. Ia mengungkapkan,

“Apalagi masyarakat yang kita hadapi waktu itu adalah korban terdampak tsunami yang keseringan mendapat bantuan. Jadi setiap kali kita datang menemui mereka pasti mereka berpikir kita akan memberikan bantuan untuk mereka. Sedangkan harfa sendiri ingin merubah pola pikir mereka tentang itu. Maka dari itu setiap kali kami bertemu dengan masyarakat kami selalu memberikan penjelasan dari hati ke hati agar bisa mereka



pahami. Program recovery ini program yang melibatkan banyak orang baik laki-laki, perempuan dan anak-anak. Sebelum kami melaksanakan program atau memberikan bantuan, biasanya kami menjalin kedekatan antara pihak laz harfa dan masyarakat. Hal ini dilakukan agar memudahkan kami ketika kami memberikan sosialisasi dan edukasi kepada mereka nantinya.”<sup>15</sup>

Di samping penanggulangan bencana, Novita Melani pun seorang fasilitator lapangan dari program unggulan LAZ Harfa, yakni Desa Harapan. Program Desa Harapan ini berfokus pada edukasi masyarakat dengan tujuan merubah pola pikir mereka untuk dapat berdaya melalui pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam. Selain itu, program Desa Harapan ini bertujuan untuk membantu pemerintah menyukseskan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Dalam program Desa Harapan, ia bercerita bahwa,

“Setelah satu tahun selesai menjadi relawan Recovery, kembali lagi saya ditugaskan untuk mendampingi desa Harapan yang terletak di Desa Ciodeng Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang. Nah disini saya ditugaskan menjadi *field facilitator* atau pendamping desa. Di sini saya

---

<sup>15</sup> Otobiografi Novita Melani (ejaan sedikit disesuaikan)

bertemu dengan banyak orang terutama ibu-ibu karena di desa dampingan tersebut ada kelompok keuangan mikro yang anggotanya kebanyakan ibu-ibu”.<sup>16</sup>

Dari cerita tersebut terlihat bahwa di lapangan lebih banyak menemui perempuan dibandingkan laki-laki yang menjadi subjek dampingan atau penerima manfaat program. Selain itu, perempuan tergabung ke dalam kelompok keuangan mikro dikarenakan mereka banyak melakukan kegiatan di lingkungan rumahnya dibandingkan laki-laki yang banyak bekerja di luar. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa perempuan lebih banyak mengenai situasi dan kondisi lingkungan sekitar yang berkaitan dengan sumber daya alam.

Berdasarkan hal tersebut, program pemberdayaan yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan di daerah tentunya banyak melibatkan perempuan. Oleh karena itu, kehadiran perempuan menjadi hal yang penting karena menurut Novita Melani hal itu memudahkan fasilitator menjalankan programnya. Ia mengungkapkan,

“Senang rasanya bisa bertemu dan berbagi cerita bersama ibu-ibu apalagi mereka sangat baik sekali menganggap saya sudah seperti anak sendiri. Ketika

---

<sup>16</sup> Otobiografi Novita Melani (ejaan sedikit disesuaikan)

kedekatan yang kita jalin sangat dekat mudah sekali untuk mengajak ibu-ibu berubah ke arah yang lebih baik. Salah satunya ibu Sanikah, beliau awalnya belum memiliki wc kemudian dengan melakukan pendekatan secara emosional beliau mulai mendengarkan apa yang kami sampaikan terkait jamban sehat. Beliau merasa tidak enak ketika saya ikut ke kamar mandi karena rumahnya belum memiliki jamban, akhirnya lama kelamaan beliau pun merasa tidak enak dan akhirnya membuat wc permanen.”<sup>17</sup>

Dari cerita di atas ditunjukkan bahwa keterlibatan perempuan berdampak cukup signifikan terhadap munculnya kesadaran masyarakat untuk berubah. Ia bercerita bahwa kehadirannya disambut dengan baik oleh masyarakat (ibu-ibu) dan bahkan dianggap sebagai anak sendiri. Menurutnya, sebagai sesama perempuan ikatan emosional dirasa lebih mudah terbangun. Jalinan ikatan emosional tersebut memberikan kemudahan agar program yang sudah direncanakan dapat sukses dan berjalan dengan baik.

Proses penyadaran menjadi bagian penting, terlebih kepada perempuan. Sebab, di daerah pelosok daerah mengurus rumah, anak, dan kebersihan lingkungan adalah perempuan itu sendiri. Ketika pemberdayaan dilakukan terhadap perempuan, tentunya perubahan tidak hanya berdampak pada satu hal saja melainkan berdampak pada

---

<sup>17</sup> Otobiografi Novita Melani (ejaan sedikit disesuaikan)

bagian lainnya. Begitu pun dengan pelaksanaan program untuk mensukseskan SDGs, ketika melibatkan perempuan, tidak hanya terjadi kesetaraan gender saja. Lebih jauh lagi, ekonomi keluarga akan terbantu sehingga tujuan-tujuan lainnya pun tercapai. Dengan perkataan lain, melalui pelibatan aktif perempuan, tujuan pembangunan tidak bersifat parsial saja melainkan menjadi terintegrasi dan terkoneksi antar tujuan yang satu dengan yang lainnya.

Sebagai seorang pekerja sosial, Novita Melani pun menaruh keprihatinan akan perilaku masyarakat terhadap lingkungan. Hal itu disampaikan dalam otobiografinya ketika bercerita mengenai keadaan masyarakat yang ia datangi untuk pelaksanaan program.

“Iya ada apalagi saat pertama kali datang ke desa pasti prihatin apalagi melihat ibu-ibu yang tidak memiliki jamban sehat yang kalau BAB harus ke hutan, sumber air pun jauh, yang jarang cuci tangan pake sabun, sampah juga tidak dikelola dengan baik, sampai akhirnya harfa datang perlahan-lahan masyarakat terutama ibu-ibu sadar akan hal itu. Karena kita sering mengedukasi dan mensosialisasikan tentang kesehatan dan cara pengelolaan sampah yang baik dan benar, sampai pada akhirnya masyarakat membuat jamban, membuat tempat cuci tangan dari bahan sederhana dan membuat kerajinan dari sampah yg sudah diolah, contohnya seperti tas yang di buat dari bungkus bekas kopi”

Dalam cerita yang disampaikan oleh Novita Melani tersebut terlihat bahwa, ia sangat prihatin terhadap kondisi masyarakat yang tidak melakukan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam dengan baik. Hal itu dilihat dari pola hidup yang tidak sehat, baik dalam pemenuhan kebutuhan biologisnya yakni mengenai tempat buang air besar sampai dengan produksi sampah yang tidak dibarengi dengan pengelolaan limbah tersebut. Keprihatinan yang dirasakan olehnya menjadi pemicu semangat untuk memberikan perubahan di lingkungan masyarakat tersebut melalui kegiatan pemberdayaan.

Otobiografi yang ditampilkan di atas terlihat sangat menarik. Pengetahuan dan pengalaman Novita Melani menjadi fasilitator dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan di masyarakat dapat dikatakan sebagai ekofeminisme. Terlepas dari berbagai macam paham terkait ekofeminisme, kegiatan LAZ Harfa melalui kegiatan pemberdayaannya mencoba untuk mengikis budaya patriarki yang cenderung dominatif sehingga berdampak eksploitatif, baik terhadap perempuan ataupun alam. Dengan perkataan lain, otobiografi perempuan pemberdaya di atas bercerita mengenai pentingnya menjadikan perempuan (melalui pengetahuan dan pengalaman lokalnya) sebagai subjek dari pembangunan itu sendiri, sehingga terjadi pemerataan dan juga terjaganya keberlangsungan lingkungan.

## 4.4 Peluang dan Tantangan

Lembaga Amil Zakat Harapan Dhuafa adalah sebuah LAZ yang terbentuk dari fusi 4 Lembaga Amil Zakat yang ada di kabupaten dan kota di Provinsi Banten. berdiri sejak tahun 2004, LAZ Harfa ikut turun membantu masyarakat aceh yang terdampak bencana tsunami. sebagai lembaga amil zakat yang telah beroperasi selama 18 tahun, LAZ Harfa terus berupaya memberikan kontribusi bagi pengembangan masyarakat di Provinsi Banten.

### 4.4.1 Tantangan

Kegiatan Sosial yang dilakukan oleh LAZ Harfa sebagian besar menggunakan pendekatan ABCD (Asset Based Community Development). Metode ini sebagai pendekatan yang berfokus pada kekuatan, kemampuan, peluang, bakat, dan keahlian sebagai landasan kepada masyarakat. Dengan pendekatan ABCD, LAZ Harfa berupaya menggali potensi yang dimiliki masyarakat untuk kemudian dilakukan pendampingan. Pendampingan yang diberikan kemudian diharapkan dapat mengembangkan potensi yang sudah dimiliki. pengembangan potensi tersebut bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, seperti peningkatan taraf hidup, peningkatan penghasilan, dan perubahan pola pikir.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat memiliki tantangannya sendiri. Tantangan terbesar yang dihadapi oleh LAZ Harfa adalah upaya perubahan mindset masyarakat terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat pada umumnya lebih mengharapkan bantuan yang bersifat charity, karena memberikan dampak instan

walaupun tidak sustainable. Sedangkan LAZ Harfa melakukan kegiatan yang bersifat sustainable, pemberdayaan masyarakat hingga perubahan pola pikir masyarakat. Sehingga kegiatan yang dilakukan oleh LAZ Harfa tidak memberikan dampak instan.

Pola bantuan sosial berorientasi charity juga umumnya lebih disukai oleh donatur, karena memberikan hasil instan dalam bentuk pembangunan fisik. Sehingga membutuhkan effort lebih untuk meyakinkan para donatur untuk mendukung program yang dilaksanakan LAZ Harfa.

Pola bantuan sosial yang bersifat charity pada akhirnya tidak memberikan dampak secara langsung terhadap Sustainable Development Goals (SDGs). Bantuan Sosial yang berorientasi charity, pada akhirnya hanya mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat, namun tidak mampu memberikan efek kepada peningkatan pendapatan masyarakat.

#### 4.4.2 Peluang

Provinsi Banten terletak di bagian barat dari pulau jawa. Banten sendiri merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Jawa Barat. Provinsi Banten baru saja merayakan hari jadinya yang ke 22 tahun, tepat pada tanggal 4 Oktober tahun 2000 Provinsi Banten resmi memisahkan diri dari Jawa Barat.

Menurut data Badan Pusat Statistik Penduduk Provinsi Banten pada tahun 2022 berjumlah 12 juta jiwa. Mayoritas penduduk Banten beragama Islam dengan persentase lebih kurang 95% dari total penduduk Provinsi Banten. Jumlah penduduk beragama Islam yang besar

menjadikan provinsi Banten memiliki potensi zakat yang sangat besar.

Berdasarkan proyeksi dirilis oleh BAZNAS Provinsi Banten, potensi zakat di Provinsi Banten mencapai angka Rp 11 Triliun. Namun, berdasarkan data penerimaan zakat pada tahun 2021 adalah sejumlah Rp 156 Miliar. Jumlah dana yang dikelola oleh BAZNAS dan LAZ yang ada di provinsi Banten memang masih sangat jauh dibandingkan dengan potensi zakat yang ada.

LAZ Harfa sebagai salah satu Lembaga Amil Zakat yang ada di Provinsi Banten melaporkan bahwa dana kelolaan yang berasal dari zakat masyarakat sebesar Rp 2,2 Miliar di tahun 2021. Sedangkan dana yang bersumber dari Shadaqah berjumlah Rp 19 Miliar. Sehingga dana yang dikelola oleh LAZ Harfa pada tahun 2021 berjumlah Rp 21 Miliar. Angka tersebut meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu Rp 16 Miliar.

Jika kita menilik lebih jauh, selama 5 tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah dana kelolaan yang signifikan. Pada tahun 2016, LAZ Harfa menghimpun dana zakat dan shadaqah dari masyarakat sebesar Rp 2,9 Miliar. Angka tersebut terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2020, terjadi penurunan dibanding tahun sebelumnya, yaitu dari Rp 16,6 pada tahun 2019 menjadi Rp 16,5 pada tahun 2020.

Peningkatan Jumlah dana yang mampu dihimpun oleh LAZ Harfa bisa terjadi karena dipengaruhi oleh 2 faktor. Faktor pertama, karena adanya perubahan cara masyarakat dalam membayar zakat dan shadaqah. Menurut



Wakil Ketua III BAZNAS Provinsi Banten, masyarakat selama ini cenderung lebih banyak membayar zakat dan shadaqah tidak melalui Amil, sehingga potensi pengelolaan dana zakat belum dapat dicapai secara maksimal. Orientasi Charity yang hanya mempengaruhi tingkat konsumsi sudah mulai ditinggalkan, beralih kepada kegiatan yang berorientasi sustainability. faktor kedua adalah tingkat kepercayaan donatur kepada meningkat terhadap LAZ Harfa, seiring dengan tingkat penyaluran dana terhimpun yang sesuai dengan harapan para donatur.

Potensi zakat dan shadaqah yang tinggi di provinsi Banten, perlu dibarengi dengan tingkat kemampuan Lembaga Amil dalam menghimpun dana zakat dan shadaqah. Kemampuan LAZ dalam menghimpun dana sangat berkaitan dengan tingkat kepercayaan donatur terhadap Lembaga Amil Zakat. Kepercayaan donatur akan tumbuh seiring dengan bagaimana lembaga amil zakat dapat menyalurkan dana yang mereka himpun ke dalam bentuk program-program unggulan yang memberi dampak bagi pemberdayaan mustahik.

Potensi Zakat dan Shadaqah yang besar melahirkan peluang bagi lembaga Amil dalam upayanya untuk memberdayakan masyarakat. Dengan trend peningkatan penghimpunan dana rata-rata sekitar 50-70%, bukan tidak mungkin pada tahun-tahun yang akan datang dana yang mampu dihimpun oleh LAZ Harfa akan terus meningkat. sehingga LAZ Harfa dapat terus mengembangkan program-program unggulannya yang berorientasi pemberdayaan masyarakat. dalam kurun waktu 5 tahun terakhir telah banyak penerima manfaat yang merasakan dampak

pemberdayaan yang dilakukan oleh LAZ Harfa. semoga tahun-tahun yang akan datang, akan lebih banyak lagi penerima manfaat yang terbantu oleh program-program yang dilaksanakan oleh LAZ Harfa dan NGO lainnya, sehingga pembangunan berkelanjutan yang menjadi tujuan bersama dapat terus ditingkatkan.

## BAB V

### PENUTUP

Pada bab ini akan disimpulkan hasil analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Terdapat beberapa simpulan yang dapat ditarik berdasarkan analisis terkait hasil studi kasus peran dan aktivitas LAZ Harfa dalam pembangunan berkelanjutan di Provinsi Banten sebagai lembaga sosial yang diasumsikan merupakan gerakan ekofeminisme.

#### 5.1 Simpulan

Berdasarkan analisis didapatkan simpulan bahwa Angka IDG provinsi Banten masih berada di bawah angka IDG rata-rata nasional, yaitu 72,10 pada tahun 2019, dan 75,57 pada tahun 2020. pada tahun 2020 Angka IDG jauh lebih baik jika dibandingkan dengan angka IDG beberapa provinsi lain, seperti NTB, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Namun, jika dibandingkan dengan provinsi lain yang berada di Pulau Jawa, Angka IDG Provinsi Banten menjadi yang terendah.

Angka IDG Provinsi Banten yang masih di bawah rata-rata IDG Nasional menunjukkan bahwa pemberdayaan Gender di Banten masih perlu ditingkatkan. peningkatan pemberdayaan Perempuan membutuhkan upaya banyak pihak, tidak hanya Pemerintah, namun juga segenap

masyarakat provinsi Banten. Keberadaan lembaga-lembaga Non-Profit atau NGO masih sangat dibutuhkan untuk ikut membangun masyarakat. Pemberdayaan masyarakat secara umum, dan pemberdayaan perempuan secara lebih khusus terbukti sangat dipengaruhi oleh kontribusi berbagai kalangan, swasta maupun pemerintah.

Adapun kehadiran LAZ Harfa melalui program-programnya telah memberikan kontribusi untuk mengurangi ketimpangan gender dan memberikan edukasi terhadap pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam dengan bijak. Dengan perkataan lain, LAZ Harfa telah turut berkontribusi terhadap gerakan ekofeminis dengan cara memperjuangkan peran perempuan melalui pelibatan aktif perempuan dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam dengan mengangkat pengetahuan dan pengalaman perempuan.

Mengenai partisipasi perempuan dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam melalui pemberdayaan menghasilkan dampak dalam jangka panjang. Pemberdayaan tidak hanya berbicara hasil dalam jangka pendek (*output*), melainkan menghasilkan luaran dalam jangka menengah (*outcome*) dengan mulai berubahnya pola pikir masyarakat. Lebih dari itu, proses pemberdayaan dirasa mampu untuk menjangkau dampak dalam jangka panjang (*impact*), yang mana perubahan pola pikir tersebut membawa perubahan

terhadap sikap dan perilaku manusia agar lebih mandiri tanpa ketergantungan.

Proses penyadaran menjadi bagian penting, terlebih kepada perempuan. Sebab, di daerah pelosok daerah mengurus rumah, anak, dan kebersihan lingkungan adalah perempuan itu sendiri. Ketika pemberdayaan dilakukan terhadap perempuan, tentunya perubahan tidak hanya berdampak pada satu hal saja melainkan berdampak pada bagian lainnya. Begitu pun dengan pelaksanaan program untuk mensukseskan SDGs, ketika melibatkan perempuan, tidak hanya terjadi kesetaraan gender saja. Lebih jauh lagi, ekonomi keluarga akan terbantu sehingga tujuan-tujuan lainnya pun tercapai. Dengan perkataan lain, melalui pelibatan aktif perempuan, tujuan pembangunan tidak bersifat parsial saja melainkan menjadi terintegrasi dan terkoneksi antar tujuan yang satu dengan yang lainnya.

## 5.2 Saran

Penelitian dengan judul “Ekofeminisme dan Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Banten: Studi Kasus Peran dan Aktifitas NGO LAZ Harfa” masih dapat membuka ruang diskusi. Bagi calon peneliti yang tertarik untuk meneliti dalam ranah kajian yang sama, dapat memperluas ranah penelitian baik rumusan masalah, penggunaan teori, dan metode pengumpulan data. Selain itu, isu SDGs yang diangkat dalam penelitian ini juga dapat dikaji dari sudut pandang yang berbeda.



## DAFTAR PUSTAKA

- Alisjahbana, A. S., dkk. 2018. Menyongsong SDGs.  
Bandung: SDG Center Universitas Padjadjaran
- Andi Anugrah Batari Fatimah, Juanda, F. 2017. Relasi Alam  
Dan Perempuan Dalam Novel Chemistry Cinta Di  
Wakatobi Karya Dedi Oedji Melalui Pendekatan  
Ekominisme, 8(9), 1-58.  
<http://ejournal.uki.ac.id/index.php/sp/article/download/468/356>
- Astuti, T. M. P. 2012. Ekofeminisme Dan Peran Perempuan  
Dalam Lingkungan. Indonesian Journal of  
Conservation, 1(1), 49-60.
- Azhima, F. F., & Muhtadin, T. 2020. MITOS DAN  
REPRESENTASI DEWI SRI DALAM RITUAL  
SINOMAN UPACARA ADAT MAPAG SRI DI  
DESA SLANGIT KABUPATEN CIREBON :  
KAJIAN SEMIOTIKA. 10(September), 217-229.
- Capra, F. 1997. The Web of Life: A New Synthesis of Mind  
and Matter. London : Harper Collins Publishers.

- Chris Barker, and E. A. J. 2016. *Cultural Studies: Theory dan Practice*. London: Sage Publishing.
- Coulon, A. 2008. *Etnometodologi (Edisi ke-3.)*. Yogyakarta: Lenggeng (Kelompok Genta Press).
- Daly, M. 1990. *No Title Gyn Ecology: The Metaethics of Radical Feminism*. Beacon Press.
- Endraswara, S. 2006. *Metodologi Penelitian Kebudayaan (Edisi ke-2)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Gadis Arrivia. 2002. *Ekofeminisme: Lingkungan Hidup Berurusan dengan Perempuan*. *Jurnal Perempuan* (21), 111-122
- Griffin, S. 1978. *Woman and Nature: The Roaring Inside Her*. New York: Harper & Row.
- Hughes, J. 2000. *Ecology and Historical Materialism*. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press.



- Ife, J. 1995. *Community Development, Creating Community Alternatives: Vision, Analysis and Practice*. Longman Australia Pty Ltd.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2020. *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2020*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Kurniawan, N. I. 2012. *Wacana Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan Dalam Lembaga Swadaya Masyarakat di Indonesia*.
- Luh, S., Pawitri, A., & Pramana, G. I. 2019. Pengaruh Pemikiran Ekofeminisme Dewi Candraningrum terhadap Gerakan Akar Rumput Masyarakat Kendeng.
- Nur, GNS. 2021. Ekologi Budaya Sebagai Wawasan Pokok Dalam Pengembangan Masyarakat Untuk Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. *Jurnal TAMBORA*, 5(1).  
<https://doi.org/10.36761/jt.v5i1.995>

- Nuraeni, Y., Septiaji, A., & Majalengka, U. 2019. Tokoh-Tokoh Perempuan Peduli Lingkungan Dalam Novel Partikel Karya Dee Lestari : 3(2), 103-120.
- Priyatna, A. 2013. Negotiating and Rethinking Local Culture: The Narratives of Indonesian Women Juggling Higher Education, Work, and Domestic Roles. *Asian Journal of Women*, 19, 95-123.
- Priyatna, A., Subekti, M., & Rachman, I. 2017. Ekofeminisme Dan Gerakan Perempuan Di Bandung. *Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*, 9(3), 439.  
<https://doi.org/10.30959/patanjala.v9i3.5>
- Rasid, R., Djafar, H., & Santoso, B. (2021). Alfred Schutz's Perspective in Phenomenology Approach: Concepts, Characteristics, Methods and Examples. *International Journal of Educational Research & Social Sciences*, 2(1), 190-201.  
<https://doi.org/10.51601/ijersc.v2i1.18>

- Smith, Dorothy E. 1990. *The Conceptual Practices of Power: A Feminist Sociology of Knowledge*. Boston: Northeastern University Press.
- Solichin, M. B. 2018. Ketika Alam dan Perempuan Lembah Baliem Diperkosa oleh Antroposentrisme Kapitalis: Kajian Ekofeminisme dalam Novel Tanah Tabu. *SEMIOTIKA: Jurnal Ilmu Sastra Dan Linguistik*, 19(1), 41. <https://doi.org/10.19184/semiotika.v19i1.7049>
- Suharto. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Reflika Aditama.
- Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Supriatna, R. M. dan N. 2017. Perlawanan Atas Kuasa Patriarki Dan Pembangunan Dunia Wangari Maathai. 261-276.
- Sukmadinata. 2005. *Dasar Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Warren, K. J. 1997. *Ecofeminism: Women, Culture, Nature*. Indiana University Press.

**Website**

[Bps.go.id](http://Bps.go.id)

[Lazharfa.org](http://Lazharfa.org)